



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2022

MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.1 -

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2022

PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01 PN: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	01 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Porsi EBT dalam bauran energi nasional		15,70 %	47.913.365,6	
		02 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		92,8		
		03 - Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan		11 WPP		
	02 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	01 - Rasio kewirausahaan nasional		3,75 %		
		02 - Pertumbuhan PDB pertanian		3,6-3,7 %		
		03 - Pertumbuhan PDB perikanan		4,00-6,00 %		
		04 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan		5,3-5,7 %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Kontribusi PDB industri pengolahan		19,9-20,0 %		
		06 - Nilai devisa pariwisata		0,86-1,71 miliar US\$		
		07 - Kontribusi PDB pariwisata		4,3 %		
		08 - Penyediaan lapangan kerja per tahun		2,6-3,1 juta orang		
		09 - Pertumbuhan investasi (PMTB)		5,4-6,3 %		
		10 - Pertumbuhan ekspor industri pengolahan		8,45 %		
		11 - Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa		5,1-5,5 %		
		12 - Rasio perpajakan terhadap PDB		8,44 %		
01.01 PP: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT (kumulatif)	2, 5	13,91 gigawatt	153.427,4	
		02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	2, 5	9,6 juta kilo liter		
01.01.01 KP: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Meningkatnya akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT	2, 5	1.933,3 megawatt	121.891,2	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.01.01.01 PRO-P: Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan	01 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLTA	2, 5	955,9 megawatt	121.891,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
		02 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi	2, 5	132 megawatt		
		03 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi	2, 5	484,8 megawatt		
		04 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLTS	2, 5	339,1 megawatt		
		05 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Bayu	2, 5	10 megawatt		
01.01.02 KP: Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	01 - Meningkatnya pasokan bahan bakar nabati	01 - Jumlah pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	5	9,60 juta kilo liter	18.120,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.4 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.01.02.01 PRO-P: Akselerasi Pengembangan BBN	01 - Terlaksananya akselerasi pengembangan BBN	01 - Persentase mandatori pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil	5	30 %	18.120,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
01.01.03 KP: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	01 - Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	01 - Intensitas energi primer	2	136,6 SBM/miliar rupiah	4.133,5	
		02 - Penurunan intensitas energi final	2	0,9 SBM/miliar rupiah		
01.01.03.01 PRO-P: Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	01 - Terlaksananya perluasan penerapan efisiensi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	2	100 %	4.133,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
01.01.04 KP: Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	01 - Meningkatnya pemenuhan energi domestik	01 - Alokasi batu bara untuk Kepentingan dalam Negeri (DMO) yang direncanakan	2	177 juta ton	7.132,4	
		02 - Persentase pemanfaatan gas bumi domestik	2	66 %		
01.01.04.01 PRO-P: Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	01 - Terlaksananya pemenuhan energi yang kompetitif	01 - Jumlah laporan pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri	2	1 laporan	7.132,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
01.01.05 KP: Pengembangan Industri Pendukung EBT	01 - Meningkatnya pengembangan industri pendukung EBT	01 - TKDN sektor pembangkit EBT	2	44,60 %	2.150,3	
01.01.05.01 PRO-P: Pengembangan Industri EBT	01 - Terlaksananya pengembangan industri EBT	01 - TKDN sektor EBT dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional	2	55,45 skala 100	2.150,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.02 PP: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01 - Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01 - Produktivitas air (<i>water productivity</i>)	2	3,57 m ³ /kg	14.430.936,6	
01.02.01 KP: Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (kumulatif)	01 - Meningkatnya pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	01 - Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	5	65 juta ha	247.387,1	
01.02.01.01 PRO-P: Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	01 - Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	01 - Luas area dengan indeks jasa lingkungan tinggi	5	7 ekoregion	44.772,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.01.02 PRO-P: Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	01 - Terlaksananya perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional secara partisipatif	01 - Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	5	2.500 desa	202.614,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.02 KP: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan produksi	2	34,3 juta ha	79.734,7	
01.02.02.01 PRO-P: Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	01 - Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	01 - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	5	30 juta m ³	13.706,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.02.02 PRO-P: Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Terlaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	01 - Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	5	60 KPH	66.028,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.03 KP: Penyediaan Air untuk Pertanian	01 - Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian	01 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	30.447 ha	3.012.430,8	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.02.03.01 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	5	30.447 ha	3.012.430,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	5	110.672 ha		
01.02.04 KP: Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	01 - Meningkatnya penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	2,86 m ³ /detik	229.204,3	
01.02.04.01 PRO-P: Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan penyediaan air baku	5	2,86 m ³ /detik	229.204,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
01.02.05 KP: Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	01 - Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	01 - Peningkatan tutupan hutan	2	425.000 ha	1.674.913,7	
01.02.05.01 PRO-P: Rehabilitasi Hutan dan Lahan	01 - Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	01 - Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional	5	425.000 ha	1.326.787,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.05.02 PRO-P: Revitalisasi/penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Terlaksananya revitalisasi/penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Perbaikan kualitas Danau Prioritas Nasional	5	15 danau prioritas	348.126,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.06 KP: Pengembangan Waduk Multiguna	01 - Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (kumulatif)	2	19,49 miliar m ³	9.187.266,1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah tampungan yang ditingkatkan pemanfaatannya	2	19 unit		
01.02.06.01 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai	5	10 unit	8.867.266,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Memiliki proyek berstatus PSN)
01.02.06.02 PRO-P: Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsi rencananya	5	19 unit	320.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya	5	5 unit		
01.03 PP: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	01 - Nilai Tukar Petani (NTP)	5	103-105	9.601.880,2	
		02 - Angka Kecukupan Energi (AKE)	5	2.100 kkal/kapita/hari		
		03 - Angka Kecukupan Protein (AKP)	5	57 gram/kapita/hari		
		04 - <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5	5,5 %		
		05 - <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	5	4,5 %		
01.03.01 KP: Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Konsumsi daging	5	14,1 kg/kapita/tahun	624.469,1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Konsumsi protein asal ternak	5	12,2 gram/kapita/hari		
		03 - Konsumsi sayur dan buah	5	286,9 gram/kapita/hari		
		04 - Konsumsi ikan	5	59,53 kg/kapita/tahun		
		05 - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	90-95 %		
		06 - Luas lahan produksi beras biofortifikasi	5	100.000 ha		
		07 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	5	60 % penerima BPNT		
		08 - Persentase pangsa pangan organik**	5	10 %		
01.03.01.01 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	01 - Konsumsi daging	5	14,1 kg/kapita/tahun	157.836,1	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Konsumsi protein asal ternak	5	12,2 gram/kapita/hari		
		03 - Konsumsi sayur dan buah	5	286,9 gram/kapita/hari		
		04 - Konsumsi kacang-kacangan	5	27,8 gram/kapita/hari		
01.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Keamanan Pangan	01 - Meningkatnya keamanan pangan	01 - Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan	5	93 %	317.346,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase pangan hewani yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	90 %		
01.03.01.03 PRO-P: Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan	5	1 VUB	142.227,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Produksi padi biofortifikasi	5	560 ribu ton GKG		
01.03.01.04 PRO-P: Pengembangan Pangan Organik	01 - Terlaksananya pengembangan pertanian organik	01 - Persentase pangsa pangan organik	5	10 %	7.059,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02 KP: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Persentase penggunaan benih bersertifikat	5	70,0 %	4.051.382,6	
		02 - Ketersediaan beras	5	44,0 juta ton		
		03 - Ketersediaan protein hewani	5	2,7 juta ton		
		04 - Produksi jagung	5	33,00 juta ton		
		05 - Produksi daging	5	5,6 juta ton		
		06 - Produksi umbi-umbian	5	24,9 juta ton		
		07 - Produksi sayuran	5	15,01 juta ton		
		08 - Produksi buah-buahan	5	27,71 juta ton		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.02.01 PRO-P: Peningkatan Produksi Padi	01 - Meningkatnya produksi padi	01 - Pertumbuhan produktivitas padi	5	3,00 %	502.967,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	5	5,0 %		
01.03.02.02 PRO-P: Peningkatan Produksi Jagung	01 - Meningkatnya produksi jagung	01 - Pertumbuhan produktivitas jagung	5	1,20 %	277.749,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02.03 PRO-P: Peningkatan Produksi Kedelai	01 - Meningkatnya produksi kedelai	01 - Pertumbuhan produktivitas kedelai	5	1,10 %	4.522,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Produksi Daging	01 - Meningkatnya produksi daging	01 - Produksi daging	5	5,6 juta ton	2.775.812,4	KEMENTERIAN PERTANIAN, PEMDA (DAK FISIK)
01.03.02.05 PRO-P: Peningkatan Produksi Hortikultura	01 - Meningkatnya produksi hortikultura	01 - Pertumbuhan produktivitas sayuran	5	5,65 %	466.890,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Peningkatan produktivitas buah-buahan	5	2,20 %		
01.03.02.06 PRO-P: Peningkatan Produksi Umbi-Umbian	01 - Meningkatnya produksi umbi-umbian	01 - Pertumbuhan produktivitas ubi kayu	5	1,50 %	23.440,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Pertumbuhan produktivitas ubi jalar	5	3,80 %		
01.03.03 KP: Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	01 - Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, dan kepastian pasar	01 - Teknologi yang diterapkan oleh petani	5	75-80 %	1.313.876,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Nilai tambah per tenaga kerja pertanian	5	54,3 juta rupiah/tenaga kerja/tahun		
01.03.03.01 PRO-P: Asuransi Pertanian	01 - Terlaksananya asuransi pertanian	01 - Luas area yang difasilitasi asuransi usaha tani padi	5	1.000.000 ha	177.920,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Jumlah ternak yang difasilitasi asuransi usaha peternak sapi/kerbau	5	120.000 ekor		
01.03.03.02 PRO-P: Pendidikan Pertanian	01 - Terlaksananya pendidikan pertanian	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian	1	84 %	229.921,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.03.03 PRO-P: Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang	01 - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang	01 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	1	100 %	773.561,7	KEMENTERIAN PERTANIAN, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	20 %		
01.03.03.04 PRO-P: Korporasi Petani	01 - Berkembangnya korporasi petani	01 - Jumlah korporasi petani yang dikembangkan	5	65 unit	132.473,4	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.03.04 KP: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	01 - Meningkatnya produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	80 %	2.434.326,4	
		02 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	30 dan 8 varietas unggul baru dan galur		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	5	4.250 aksesi		
01.03.04.01 PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya air pertanian	01 - Luasan rehabilitasi jaringan irigasi	5	219.000 ha	479.772,1	KEMENTERIAN PERTANIAN, PEMDA (DAK FISIK)
01.03.04.02 PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya lahan pertanian	01 - Luas lahan sawah yang ditetapkan LP2B tiap tahunnya	5	5.971.158,4 ha	1.950.408,4	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, PEMDA (DAK FISIK)
01.03.04.03 PRO-P: Peningkatan varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Meningkatnya varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	43 varietas unggul baru dan galur	4.146,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.04.04 PRO-P: Peningkatan sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	01 - Peningkatan sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	01 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	5	4.250 aksesi	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.05 KP: Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	01 - Meningkatnya tata kelola sistem pangan nasional	01 - <i>Global food security index</i>	5	66,9	1.177.825,2	
01.03.05.01 PRO-P: Stabilisasi Harga Pangan	01 - Stabilitasnya harga pangan strategis	01 - Koefisien varian harga pangan	5	2,00	62.600,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.05.02 PRO-P: Penanganan Rawan Pangan	01 - Menurunnya daerah rawan pangan	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	5	14 %	103.251,4	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.13 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.05.03 PRO-P: Penguatan Cadangan Pangan Nasional	01 - Menguatnya cadangan pangan nasional	01 - Cadangan beras	5	6-10 juta ton	1.011.973,9	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, PEMDA (DAK FISIK) (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
01.03.05.04 PRO-P: Desain Ulang Kelembagaan Pangan Nasional	01 - Terlaksananya pembahasan desain ulang kelembagaan pangan nasional	01 - Pembahasan desain ulang kelembagaan pangan nasional	5	10 pembahasan	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.04 PP: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	01 - Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	01 - Konservasi kawasan kelautan	5	25,10 juta ha	1.843.407,9	
		02 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	5	≤72 %		
		03 - Produksi perikanan	5	29,42 juta ton		
		04 - Produksi garam	5	2,60 juta ton		
		05 - Nilai tukar nelayan	5	104-106		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	01 - Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	01 - Pengelola WPP	5	11 unit	64.006,9	
		02 - Akurasi pendataan <i>stock</i> dan pemanfaatan WPP	4	11 WPP		
		03 - Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	31 RZ		
01.04.01.01 PRO-P: Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Jumlah model percontohan penguatan tata kelola WPP	4	7 WPP	15.400,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.01.02 PRO-P: Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Terlaksananya penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir	01 - Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT dan antarwilayah laut	5	22 RZ	34.906,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
01.04.01.03 PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01 - Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01 - Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	5	34 lokasi	13.700,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.02 KP: Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01 - Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	5	13.891.741 ha	23.597,6	
01.04.02.01 PRO-P: Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola	5	12 kawasan	18.797,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.02.02 PRO-P: Pengembangan Marine Bioproduct dan Bioteknologi	01 - Terlaksananya pengembangan marine <i>bioproduct</i> dan bioteknologi	01 - Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan	5	8 paket	4.800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03 KP: Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	01 - Produksi ikan	5	17,57 juta ton	1.502.691,6	
		02 - Produksi rumput laut	5	11,85 juta ton		
01.04.03.01 PRO-P: Peningkatan Produksi Perikanan	01 - Meningkatnya produksi perikanan	01 - Produksi ikan tangkap	5	8,88 juta ton	1.356.311,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
		02 - Produksi ikan budi daya	5	8,69 juta ton		
01.04.03.02 PRO-P: Peningkatan Produksi Rumput Laut	01 - Meningkatnya produksi rumput laut	01 - Jumlah produksi rumput laut	5	11,85 juta ton	7.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03.03 PRO-P: Peningkatan Produksi Garam	01 - Meningkatnya produksi garam	01 - Jumlah produksi garam	5	2,60 juta ton	74.664,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
01.04.03.04 PRO-P: Karantina Ikan dan Jaminan Mutu	01 - Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu	01 - Persentase pencegahan impor, ekspor, antararea jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi	5	90 %	64.215,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.04 KP: Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	01 - Meningkatnya fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	5	3,6 triliun rupiah	77.616,4	
		02 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	5	103		
01.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	01 - Meningkatnya perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan	01 - Jumlah nelayan dan pembudi daya ikan yang terlindungi	5	126.500 orang	27.300,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.04.02 PRO-P: Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	01 - Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budi daya	5	12.500 bidang	30.116,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.04.03 PRO-P: Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan	01 - Integrasi sistem perizinan pusat-daerah	4	34 provinsi	20.199,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
01.04.05 KP: Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan	01 - Jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan	5	11 hasil riset	175.495,6	
01.04.05.01 PRO-P: Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan	01 - Jumlah masyarakat yang disuluh	1	410.000 orang	107.858,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.05.02 PRO-P: Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan	01 - Data, informasi dan peta hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan	5	11 paket	67.637,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.05 PP: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01 - Menguatnya kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	01 - Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	1,5	27,80 %	2.402.046,0	
		02 - Pertumbuhan wirausaha	1	3,00 %		
		03 - Kontribusi koperasi terhadap PDB	1,5	5,30 %		
01.05.01 KP: Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Meningkatnya kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	01 - Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan	1,5	9,50 %	1.116.979,6	
		02 - IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	5	190 IKM (kumulatif)		
01.05.01.01 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	01 - Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya	1,5	30.000 UMKM	1.007.774,1	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN), KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.18 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.05.01.02 PRO-P: Perluasan Kemitraan Usaha	01 - Terlaksananya perluasan kemitraan usaha	01 - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya	1, 5	800 UMKM	46.773,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
01.05.01.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	1, 5	10.000 UMKM	62.432,5	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.05.02 KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	01 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	5	20,90 %	130.612,3	
		02 - Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit	5	3,40 %		
		03 - Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	5	70,00 %		
01.05.02.01 PRO-P: Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	01 - Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	01 - Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha	5	2.500 orang	101.387,6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.05.02.02 PRO-P: Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	01 - Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	01 - Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan	5	12.000 UMKM	25.047,1	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.02.03 PRO-P: Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM	01 - Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya	5	250 UMKM	4.177,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03 KP: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	01 - Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	200 unit (kumulatif)	35.287,4	
01.05.03.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	01 - Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	1, 5	3.000 orang	20.637,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.02 PRO-P: Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	01 - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	01 - Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi	1, 5	250 kelompok masyarakat/koperasi	5.336,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.03 PRO-P: Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	01 - Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya	5	600 koperasi	6.025,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.04 PRO-P: Pengembangan Inovasi Koperasi	01 - Terlaksananya pengembangan inovasi kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi	5	150 koperasi	3.287,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.04 KP: Peningkatan Penciptaan <i>Start-Up</i> dan Peluang Usaha	01 - Meningkatnya penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha	01 - Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	5	19,3 %	1.105.641,5	
		02 - Penumbuhan <i>start-up</i>	5	2.100 <i>start-up</i> (kumulatif)		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.20 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	12.000 WUB		
01.05.04.01 PRO-P: Pelatihan Kewirausahaan	01 - Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang dilatih	1, 5	50.000 orang	420.153,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN PERTANIAN
01.05.04.02 PRO-P: Inkubasi Usaha	01 - Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang diinkubasi	1, 5	11.000 wirausaha/ <i>start-up</i> /UMKM	101.224,1	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.05.04.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	01 - Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	01 - Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha	5	7.170 UMKM	539.230,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, PEMDA (DAK FISIK)
01.05.04.04 PRO-P: Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Terlaksananya pengembangan sentra industri kecil dan menengah	01 - Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	5	11 sentra IKM (kumulatif)	14.263,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.05.04.05 PRO-P: Pembinaan Wirausaha Mapan	01 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan	01 - Jumlah wirausaha mapan yang terbentuk	1, 5	100 orang	30.770,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.21 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan yang memperoleh dukungan akses pasar	01 - Jumlah wirausaha mapan yang mendapatkan dukungan akses pasar	1, 5	600 UMKM		
01.05.05 KP: Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	01 - Meningkatnya nilai tambah usaha sosial	01 - Kontribusi usaha sosial	5	2,2 %	13.525,2	
01.05.05.01 PRO-P: Pembinaan Wirausaha Sosial	01 - Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial	01 - Jumlah lembaga yang membina wirausaha sosial	5	35 lembaga	8.875,2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.05.02 PRO-P: Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	01 - Meningkatnya jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan	01 - Jumlah usaha yang dibina	1, 5	11.000 orang/wirausaha	4.650,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.06 PP: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	5	5,3-5,7 %	16.169.881,8	
		02 - Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas	5	18,0 - 18,1 %		
		03 - Nilai tambah ekonomi kreatif	5	1.236,0 triliun rupiah		
		04 - Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	5	20,9 juta orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.22 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	5	15,00 %		
		06 - Jumlah tenaga kerja pariwisata	5	14,7 juta orang		
		07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	5	19,91 juta orang		
		08 - Nilai realisasi PMA dan PMDN	5	968,4 triliun rupiah		
		09 - Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	5	352,5 triliun rupiah		
		10 - Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	5	3,6 - 3,8 %		
01.06.01 KP: Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	01 - Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	01 - Pertumbuhan PDB perkebunan	5	4,98 %	1.660.676,8	
		02 - Pertumbuhan PDB hortikultura	5	5,90 %		
		03 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	5	5,30-5,80 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.23 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.01.01 PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan	01 - Peningkatan produksi kakao	5	2,5 %	747.887,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Peningkatan produksi kopi	5	1,48 %		
		03 - Peningkatan produksi kelapa sawit	5	5,93 %		
		04 - Peningkatan produksi kelapa	5	0,7 %		
		05 - Peningkatan produksi karet	5	0,9 %		
		06 - Peningkatan produksi sagu	5	4,5 %		
		07 - Peningkatan produksi tebu	5	6,0 %		
		08 - Peningkatan produksi lada	5	0,1 %		
		09 - Peningkatan produksi pala	5	0,1 %		
		10 - Peningkatan produksi cengkeh	5	0,1 %		
01.06.01.02 PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan	01 - Peningkatan produksi sayuran	5	2,9 %	626.948,9	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KEUANGAN, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Peningkatan produksi buah-buahan	5	4,7 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.24 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Peningkatan produksi florikultura	5	5,3 %		
01.06.01.03 PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan	01 - Penumbuhan PDB industri furnitur	5	6,00-7,00 %	16.079,3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.06.01.04 PRO-P: Pengembangan Industri Kemaritiman	01 - Terlaksananya pengembangan industri kemaritiman	01 - Pertumbuhan PDB perikanan	5	4,00-6,00 %	209.852,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.01.05 PRO-P: Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Logam	01 - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi, dan logam	01 - Pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional	5	9,80-10,50 %	59.908,8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.02 KP: Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	01 - Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	01 - Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi	5	11 KI-KEK industri	6.090.795,7	
01.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi	01 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar	5	9,50-11,00 %	6.067.712,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU) (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.25 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.02.02 PRO-P: Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah	01 - Terlaksananya pemanfaatan mineral dan batu bara untuk peningkatan nilai tambah	01 - Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri	5	77,63 %	23.082,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara	5	50 %		
01.06.03 KP: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01 - Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	01 - Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya	5	10 destinasi	7.599.288,6	
		02 - Revitalisasi destinasi Bali	5	1 destinasi		
		03 - Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas	5	25 unit		
		04 - Destinasi wisata berbasis <i>geopark</i>	5	16 destinasi		
		05 - Destinasi wisata bahari	5	6 destinasi		
01.06.03.01 PRO-P: Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	01 - Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah destinasi wisata alam prioritas	5	25 destinasi	56.973,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.26 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.03.02 PRO-P: Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi serta daya dukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitasnya, amenitas, atraksi, serta daya dukungnya	5	10 destinasi	7.380.920,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPB), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPB), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (KPB), PEMDA (DAK FISIK) (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
01.06.03.03 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata	01 - Terlaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	01 - Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	5	13 destinasi/provinsi	44.578,4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
01.06.03.04 PRO-P: Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	01 - Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	5	3 destinasi	107.147,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.27 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.03.05 PRO-P: Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata <i>Geopark</i>	01 - Terlaksananya pengembangan 16 <i>geopark</i> untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah koordinasi pengembangan <i>geopark</i>	5	1 kegiatan	9.669,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BNP
01.06.04 KP: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	5	3,78 %	179.180,8	
		02 - Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi	5	9,75-10,28 %		
01.06.04.01 PRO-P: Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan <i>Brand</i>	01 - Terlaksananya penyediaan insentif inovasi dan pengembangan <i>brand</i>	01 - Jumlah skema insentif inovasi dan pengembangan <i>brand</i>	4	3 skema	1.990,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.02 PRO-P: Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	01 - Terlaksananya penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	01 - Jumlah penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	5	860 kegiatan	8.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.03 PRO-P: Fasilitasi Rantai Pasok dan <i>Scale-up</i> Karya dan Platform Kreatif Unggulan	01 - Terlaksananya fasilitasi rantai pasok dan <i>scale-up</i> karya dan platform kreatif unggulan	01 - Jumlah fasilitasi rantai pasok dan <i>scale-up</i> karya dan platform kreatif unggulan	5	51 kerja sama	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.04 PRO-P: Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	01 - Terlaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif	01 - Jumlah kerja sama pengembangan kota kreatif	5	2 kawasan	53.018,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Memiliki proyek berstatus PSN)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.28 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.04.05 PRO-P: Pengembangan 'Start-Up Parks' dan Center of Excellence	01 - Terlaksananya pengembangan 'Start-Up Parks' dan center of excellence	01 - Jumlah 'Start-Up Parks' dan center of excellence yang dikembangkan	5	1 kerja sama	17.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.04.06 PRO-P: Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	01 - Jumlah pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	5	497 kegiatan	92.190,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.07 PRO-P: Pengembangan Kawasan Be Creative District (BCD)	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan Be Creative District (BCD)	01 - Jumlah kawasan Be Creative District (BCD) yang dikembangkan	5	1 kegiatan	981,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.05 KP: Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	01 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	5	48,3 %	632.139,9	
		02 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	5	47,4 %		
01.06.05.01 PRO-P: Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	01 - Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi	01 - Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	5	1 usulan rekomendasi	45.623,4	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
01.06.05.02 PRO-P: Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	01 - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di wilayah I,II,III dan IV	5	113 perusahaan	276.094,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.29 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.05.03 PRO-P: Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan	01 - Perusahaan besar dan menengah yang mendapatkan pemahaman tata cara pengesahan ePP	5	1.500 badan usaha	310.422,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
01.06.06 KP: Pengembangan Industri Halal	01 - Terlaksananya pengembangan industri halal	01 - Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi	5	3 sektor industri	7.800,0	
01.06.06.01 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Terlaksananya Pengembangan infrastruktur industri halal	01 - Jumlah kawasan industri tematik yang difasilitasi	5	3 kawasan industri	7.800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.07 PP: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Neraca perdagangan barang	5	31,4-31,7 miliar US\$	699.908,7	
		02 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	0,8-1,2 %		
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara	5	1,8-3,6 juta kunjungan		
		04 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5	260-280 juta perjalanan		
		05 - Nilai ekspor hasil perikanan	5	7,13 miliar US\$		
		06 - Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi	5	8,2-10,1 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.30 -

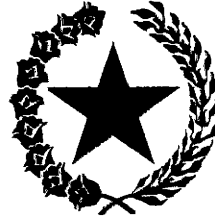
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.01 KP: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	01 - Meningkatnya diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	01 - Pertumbuhan ekspor pertanian	5	9,0 - 10,0 %	56.438,1	
		02 - Ekspor hasil pertanian (FoB)	5	4,3 miliar US\$		
		03 - Kontribusi ekspor industri pengolahan	5	77,18 %		
		04 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen ilmiah, mesin listrik, dirgantara)	5	12,2-12,4 %		
		05 - Rasio ekspor jasa terhadap PDB	5	1,6-2,0 %		
		06 - Nilai ekspor produk industri kehutanan	5	9,75 miliar US\$		
		07 - Nilai ekspor industri pengolahan	5	153,7 miliar US\$		
		08 - Nilai ekspor produk rempah-rempah	5	1.470,17 juta US\$		
01.07.01.01 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan	5	36 perusahaan	5.575,3	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.01.02 PRO-P: Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	5	140 produk	50.862,7	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
		02 - Jumlah restoran Indonesia di luar negeri	5	2.000 unit		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.1.31 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.02 KP: Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	01 - Meningkatnya akses dan pendalaman pasar ekspor	01 - Jumlah negara tujuan ekspor	5	221 negara	135.064,3	
		02 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	5	1,8 %		
		03 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	5	3,60 %		
01.07.02.01 PRO-P: Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	01 - Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia	01 - Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang	5	25 kegiatan promosi	63.124,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI
01.07.02.02 PRO-P: Fasilitasi Ekspor	01 - Terlaksananya fasilitasi ekspor	01 - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan)	5	1.009.020 badan usaha	39.845,6	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07.02.03 PRO-P: Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	01 - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	01 - Nilai ekspor produk industri sektor ILMATE	5	42,88 miliar US\$	32.093,8	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN), KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.32 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Nilai ekspor produk industri sektor agro	5	62,55 miliar US\$		
		03 - Nilai ekspor produk industri IKFT	5	38,42 miliar US\$		
		04 - Nilai ekspor produk industri aneka	5	9,84 miliar US\$		
01.07.03 KP: Pengelolaan Impor	01 - Meningkatnya pengelolaan impor	01 - Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	5	50,9 %	31.933,2	
01.07.03.01 PRO-P: Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	01 - Terlaksananya penguatan kebijakan perlindungan akses pasar dalam negeri	01 - Jumlah pengawasan <i>post border</i>	5	1.000 produk	31.933,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.04 KP: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	01 - Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	01 - Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	5	7.130 produk (kumulatif)	27.406,2	
01.07.04.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Katalog	01 - Terlaksananya pengembangan sistem katalog	01 - Jumlah kontrak katalog lokal/sektoral	5	40 katalog	27.406,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
01.07.05 KP: Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	01 - Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global	01 - Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	5	2 kesepakatan	12.750,0	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.33 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.05.01 PRO-P: Peningkatan Investasi (Inbound & Outbound) Industri GPN Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	01 - Terlaksananya peningkatan investasi (<i>inbound dan outbound</i>) industri GPN berbasis hilirisasi SDA teknologi tinggi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi kemitraan dalam <i>global value chain</i>	5	7 badan usaha	12.750,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.07.06 KP: Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi <i>Branding</i> , dan Produk Kreatif	01 - Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran, destinasi pariwisata prioritas dan destinasi <i>branding</i> , dan produk kreatif	01 - Jumlah <i>branding Wonderful Indonesia</i>	5	10 destinasi <i>branding</i>	280.370,2	
		02 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	5	18,08 miliar US\$		
		03 - Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (<i>cultural heritage regeneration</i>)	5	2 lokasi		
01.07.06.01 PRO-P: <i>Branding Wonderful Indonesia</i>	01 - Terlaksananya <i>branding Wonderful Indonesia</i>	01 - Jumlah <i>media branding</i>	5	4 media	165.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07.06.02 PRO-P: Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	01 - Terlaksananya pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	01 - Jumlah pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	5	3 regional pemasaran	79.246,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07.06.03 PRO-P: Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk melalui <i>e-Commerce</i>	01 - Terlaksananya perluasan pemasaran produk kreatif, termasuk melalui <i>e-commerce</i>	01 - Jumlah dukungan/fasilitasi pada pelaku ekonomi kreatif	5	1 promosi	-	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07.06.04 PRO-P: Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran	01 - Terlaksananya perluasan diklat manajemen usaha dan pemasaran	01 - Jumlah diklat manajemen usaha dan pemasaran	1, 5	13.000 orang	36.124,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.34 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.07 KP: Peningkatan Efektivitas <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA)/ <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	01 - Meningkatnya efektivitas <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA)/ <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) dan diplomasi ekonomi	01 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	5	88 negara	155.946,7	
		02 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	5	75 negara		
		03 - Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional	5	4 ratifikasi		
		04 - Jumlah promosi <i>Tourism, Trade, and Investment</i> (TTI) terintegrasi	5	9 promosi terintegrasi		
		05 - PTA/FTA/CEPA yang disepakati	5	30 (kumulatif) kesepakatan		
01.07.07.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM (negosiator) dan kelembagaan perwakilan RI di luar negeri, termasuk FTA Center	01 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator	5	80 orang	478,8	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.07.02 PRO-P: Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	01 - Jumlah kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang diikuti	5	38 dokumen kesepakatan/perundingan	47.020,5	KEMENTERIAN PERDAGANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.35 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.07.03 PRO-P: Promosi Terintegrasi	01 - Terlaksananya promosi terintegrasi	01 - Jumlah promosi terintegrasi	5	9 pameran	108.447,5	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08 PP: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01 - Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	01 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	5	4,53 %	2.611.877,0	
		02 - Skor <i>logistic performance index</i>	5	3,40 skor		
		03 - Rasio M2/PDB	5	47,4%		
		04 - Peringkat <i>travel and tourism competitiveness index</i>	5	36-39 peringkat		
		05 - Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>)	5	66 %		
		06 - Imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara	5	menurun		
		07 - Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	5	28,94 %		
01.08.01 KP: Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Meningkatnya pendalaman sektor keuangan	01 - Rasio kredit/PDB	5	34,0-34,7 %	1.659,6	
		02 - Jumlah mesin ATM per 100.000 penduduk dewasa	5	56,7 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.36 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk dewasa	5	15,3 unit		
		04 - Skema pembiayaan berbasis HKI	5	1 skema		
01.08.01.01 PRO-P: Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan	01 - Terlaksananya peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan	01 - Indeks inklusi keuangan	5	85 %	459,6	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.01.02 PRO-P: Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	01 - Terlaksananya peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan pemerintah	01 - <i>Turnover</i> rasio SBN	5	5,02 %	1.200,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
01.08.02 KP: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	01 - Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	01 - Kontribusi ekonomi digital	5	5,32 %	263.909,4	
		02 - Nilai transaksi <i>e-commerce</i>	5	689,5 triliun rupiah		
01.08.02.01 PRO-P: Penguatan Industri <i>Fintech, e-Commerce, On-Demand Service, dan Internet Of Things</i>	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	5	160 orang	12.616,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08.02.02 PRO-P: Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri	01 - Terlaksananya modernisasi industri hingga 4.0 sesuai karakteristik industri	01 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	5	45 perusahaan	251.292,5	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.37 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.08.03 KP: Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	01 - Meningkatnya sistem logistik dan stabilitas harga	01 - Skor <i>logistic performance index</i>	5	3,4	1.089.698,8	
		02 - Tingkat inflasi	5	2,0-4,0 %		
01.08.03.01 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	01 - Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik	01 - Jumlah sarana prasarana pendukung efisiensi distribusi yang dibangun	5	87 unit	1.071.820,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, PEMDA (DAK FISIK)
01.08.03.02 PRO-P: Pengendalian Inflasi	01 - Terjaganya inflasi pangan bergejolak	01 - Tingkat inflasi pangan bergejolak	5	2,1-4,1 %	17.878,1	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08.04 KP: Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	01 - Meningkatnya penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	01 - Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	5	5 %	76.050,0	
		02 - Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	5	11 lokasi		
01.08.04.01 PRO-P: Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	5	11 destinasi	61.050,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.08.04.02 PRO-P: Penerapan Industri Hijau	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	5	46 perusahaan	15.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.38 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.08.05 KP: Reformasi Fiskal	01 - Terlaksananya reformasi fiskal	01 - Persentase realisasi penerimaan negara	5	100 %	446.001,2	
01.08.05.01 PRO-P: Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan terintegrasi	01 - Jumlah proses bisnis <i>core tax system</i>	5	20 proses bisnis (<i>development</i>)	408.756,3	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.05.03 PRO-P: Perumusan Kebijakan Terkait Pembiayaan	01 - Terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan	01 - Persentase terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan	5	100 %	19.716,9	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.05.04 PRO-P: Pengembangan Sistem Pembayaran	01 - Terlaksananya pengembangan sistem pembayaran	01 - Persentase terlaksananya pengembangan sistem pembayaran	5	100 %	16.454,9	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.05.05 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan <i>Data Analytic</i>	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan <i>data analytic</i>	01 - Persentase pembangunan dan pengembangan <i>data analytic</i>	5	100 %	1.073,2	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.06 KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	01 - Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	5	3 <i>database</i>	734.558,0	
		02 - Pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	5	3 <i>database</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.39 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
01.08.06.01 PRO-P: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	5	3 database	14.093,7	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN PUSAT STATISTIK
01.08.06.03 PRO-P: Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan	01 - Terlaksananya sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	01 - Jumlah publikasi/laporan sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	5	3 database	720.464,3	BADAN PUSAT STATISTIK

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya dimunculkan pada salah satu ProP;
- 2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, dan KPBU, namun belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- 3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2022.
- 4) Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
 1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan Infrastruktur
 3. Penyederhanaan Regulasi
 4. Penyederhanaan Birokrasi
 5. Transformasi Ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.1 -

PRIORITAS NASIONAL 2 : MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02 PN: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	01 - Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI		5,79—6,15 % per tahun	96.705.651,3	
		02 - IPM KTI		62,06—78,11 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin KTI		10,97 %		
	02 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	01 - Laju pertumbuhan PDRB KBI		4,99—5,33 % per tahun		
		02 - IPM KBI		70,51—82,99 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin KBI		8,64 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01 PP: Pembangunan Wilayah Sumatera	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	5	4,43—4,74 % per tahun	36.541.202,0	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sumatera	1	70,51—76,91 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera	1	9,13 %		
02.01.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	3.213.951,1	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	14 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	2 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	4 kawasan		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	4 jumlah KI		
		07 - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	5	2 jumlah kawasan		
02.01.01.01 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	905.562,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.02 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	>1	48.502,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.03 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	>1	632.152,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.4 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.01.04 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat	5	>1	763.550,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMDA (DAK FISIK)
02.01.01.05 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	>1	401.175,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.01.01.06 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	447.758,6	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.01.07 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	700,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.08 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	6.514,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPB), PEMDA (DAK FISIK)
02.01.01.10 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan Aerospace	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Bintan Aerospace	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	-	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.11 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sadai	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Sadai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	>1	-	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.6 -

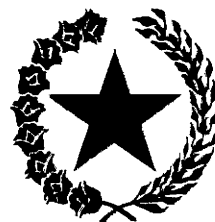
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.01.12 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Sabang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	8.035,8	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
02.01.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	3 - 5 %	104.513,5	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	2 - 4 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1 - 2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - karet	5	2 - 3 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2 - 4 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4 - 6 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1 - 2 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	2 - 4 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	5	4 - 6 %		
02.01.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - kopi	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - kakao	5	5 - 7 %	2.512,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - lada, pala, cengkeh	5	5 - 7 %	1.128,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - perikanan tangkap	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh - perikanan budidaya	5	5 - 7 %	210,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.11 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kopi	5	2 - 4 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.12 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kelapa sawit	5	4 - 6 %	879,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - kelapa sawit	5	4 - 6 %	742,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.21 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - perikanan budidaya	5	1 - 2 %	8.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.23 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - kelapa sawit	5	6 - 8 %	791,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.24 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - karet	5	1 - 2 %	1.648,8	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - kelapa	5	1 - 2 %	4.222,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.27 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - perikanan budidaya	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - karet	5	1 - 2 %	9.176,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.32 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - kelapa sawit	5	6 - 8 %	742,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.33 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - kopi	5	3 - 5 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.35 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - perikanan budidaya	5	1 - 3 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.37 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - karet	5	4 - 6 %	21.397,4	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.39 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - kelapa sawit	5	4 - 6 %	1.025,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.41 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.42 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - perikanan budidaya	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.48 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu - kelapa sawit	5	2 - 4 %	639,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.49 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.51 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - lada	5	1 - 3 %	3.127,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.52 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - kelapa sawit	5	1 - 2 %	1.025,1	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.54 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.55 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan budidaya	5	5 - 7 %	2.670,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.56 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - lada, pala, cengkeh	5	5 - 7 %	6.087,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.61 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Pala di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - pala	5	1 - 2 %	785,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.62 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	37.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda Aceh (angka perhitungan sementara)	5	47,41	1.838.906,7	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (angka perhitungan sementara)	5	43,72		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lhokseumawe (angka perhitungan sementara)	5	39,66		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (angka perhitungan sementara)	5	39,72		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (angka perhitungan sementara)	5	57,29		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (angka perhitungan sementara)	5	60,42		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pematangsiantar (angka perhitungan sementara)	5	55,50		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gunungsitoli (angka perhitungan sementara)	5	37,60		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Padang (angka perhitungan sementara)	5	47,38		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Solok (angka perhitungan sementara)	5	42,15		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi (angka perhitungan sementara)	5	48,38		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.13 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Dumai (angka perhitungan sementara)	5	58,63		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru (angka perhitungan sementara)	5	61,92		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jambi (angka perhitungan sementara)	5	43,47		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Palembang (angka perhitungan sementara)	5	48,63		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih (angka perhitungan sementara)	5	49,17		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (angka perhitungan sementara)	5	55,65		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu (angka perhitungan sementara)	5	45,60		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bandar Lampung (angka perhitungan sementara)	5	45,54		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal Pinang (angka perhitungan sementara)	5	46,44		
		21 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanjungpinang (angka perhitungan sementara)	5	47,66		
		22 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batam (angka perhitungan sementara)	5	51,34		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	20 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02.01.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Aceh	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	5	1 kota	73.978,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.01.03.02 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Bengkulu	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	64.860,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.03.03 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jambi	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	13.925,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.01.03.04 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	11.425,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.01.03.05 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	32.338,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.01.03.06 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Lampung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	44.648,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), PEMDA (DAK FISIK)
02.01.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	310.832,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), PEMDA (DAK FISIK)
02.01.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota	58.679,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.03.09 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	120.225,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.01.03.10 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota	14.803,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PEMDA (DAK FISIK)
02.01.03.11 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	230.308,7	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.01.03.12 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	862.880,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), PEMDA (DAK FISIK)
	02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.01.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Sumatera	1, 5	58,93	30.827.412,7	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	58,38		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sumatera	5	59,00		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Sumatera	1	10,20 - 10,70 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan)		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	36 kecamatan		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,49 IPKP		
02.01.04.07 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Aceh	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Aceh	1, 5	60,15	1.784.565,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.08 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur	1, 5	64,41	9.687,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.18 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.09 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantera, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantera, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Aceh	5	57,89	7.910,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.10 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Aceh	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Aceh	5	3 kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.11 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang	5	0,48 IPKP	625,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Utara	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Utara	1, 5	54,57 nilai	3.378,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Samosir	1, 5	66,72	37.354,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.14 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sumatera Utara	5	2 kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.15 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	18,50 - 19,00 %	45.617,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	63,50 - 64,00		
02.01.04.16 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Barat	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat	1, 5	69,67 nilai	1.910,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.17 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Agam	1, 5	56,75	22.089,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.04.18 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	5	68,07	310,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.19 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	11,60 - 12,10 %	625,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	61,70 - 62,20		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.20 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.20 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Riau	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Riau	1, 5	65,15 nilai	750,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.21 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Riau	5	7 kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.22 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Bengkalis	5	0,53 IPKP	-	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.23 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Jambi	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jambi	1, 5	63,87	1.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.24 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi	1, 5	58,15	479,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.25 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Jambi	5	33,82	44,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.26 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan	1, 5	62,70	1.320,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.21 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.27 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin	1, 5	61,13	97.598,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.28 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	5	59,71	2.154,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.29 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	18,00 - 18,50 %	3.044,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	66,20 - 66,70		
02.01.04.30 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Bengkulu	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bengkulu	1, 5	58,80	1.585,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.31 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bengkulu Tengah	1, 5	55,00	733,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.32 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu	5	71,73	2.040,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.22 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.33 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Lampung	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Lampung	1, 5	64,00	2.084,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.34 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Tulang Bawang	1, 5	61,21	1.808,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.04.35 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung	5	55,17	2.048,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.36 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1	13,80 - 14,30 %	28.775.268,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1	66,00 - 66,50		
02.01.04.37 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1, 5	72,10 nilai	1.250,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.38 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	1, 5	54,65	10.075,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.23 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.39 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung	5	71,23	161,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.40 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Riau	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Riau	1, 5	63,75	3.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.41 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan dan Karimun	1, 5	58,52	5.589,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.42 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kepulauan Riau	5	24 kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.43 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai	5	0,47 IPKP	800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,15 nilai	556.418,0	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	44,30 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.24 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	121 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	96 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	14.641 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	23 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	96 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	7 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	83,16 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	3.855.104 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.25 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	2.258.341 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	39 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	27 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	14 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	14 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	2 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	1 perkara		
	12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	312.845 km ²		
		02 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	974 desa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.26 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	468.683 km ²		
02.01.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Aceh	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.724 dokumen	12.806,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	84,78 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	17 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	13 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.27 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	4	1 rekomendasi		
02.01.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	139.630 bidang	51.787,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	93.480 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	16.550 bidang		
02.01.05.06 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Aceh	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	2.881,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.28 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.209 dokumen	2.254,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,90 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	33,00 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	25 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.29 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	212.100 bidang	77.351,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	125.160 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	38.730 bidang		
02.01.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	8 rekomendasi kebijakan	3.882,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.10 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.824 dokumen	2.423,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.30 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,00 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	81,00 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	13 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.11 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	382.504 bidang	128.414,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.31 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	02 - Jumlah bidang tanah	5	343.200 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.200 bidang		
02.01.05.12 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	5.099,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.13 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.606 dokumen	2.332,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	83,94 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.32 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	39 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	15.210 bidang	24.623,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	5.028 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	360 bidang		
02.01.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Riau	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.139,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.33 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	576 dokumen	2.458,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,94 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks Inovasi Tinggi	4	38 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.17 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	46.257 bidang	11.932,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.34 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	7.600 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	900 bidang		
02.01.05.18 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	11 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan	506,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.05.19 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jambi	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.086 dokumen	2.076,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,66 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	66 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	11 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.35 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.20 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	35.540 bidang	47.241,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	33.700 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	54.000 bidang		
02.01.05.21 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jambi	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.520,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.36 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.22 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	2.015 dokumen	2.134,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	84,75 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks Inovasi Tinggi	4	46 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	13 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	10 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.37 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.23 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	87.960 bidang	47.232,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	21.650 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	15.630 bidang		
02.01.05.24 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	2.565,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.25 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Lampung	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	872 dokumen	1.979,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,58 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.38 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks Inovasi Tinggi	4	37 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	11 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.26 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	151.500 bidang	49.194,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	86.580 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	82.500 bidang		
02.01.05.27 PRO-P: Penyelenggaraan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	3.170,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.39 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penataan Ruang di Provinsi Lampung						
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	1 perkara		
02.01.05.28 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bengkulu	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.152 dokumen	2.089,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	78,72 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	42 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.40 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.29 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	59.780 bidang	23.035,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	20.260 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	10.440 bidang		
02.01.05.30 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.383,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.31 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah	4	577 dokumen	2.119,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.41 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik				
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	86,71 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	37 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.32 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	54.100 bidang	18.951,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	24.910 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.903 bidang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.42 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.33 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.329,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.34 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	68.275 km ²	11.000,0	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	71.970 km ²		
02.01.05.35 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	38.945 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	41.530 km ²		
02.01.05.36 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	619 desa	9.498,5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	76.602 km ²		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.43 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	84.904 km ²		
02.01.05.37 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Lampung	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	355 desa	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	32.751 km ²		
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	33.008 km ²		
02.01.05.38 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Bengkulu	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	19.921 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	20.071 km ²		
02.01.05.39 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jambi	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	47.551 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	48.396 km ²		
02.01.05.40 PRO-P: Penyelenggaraan	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	15.979 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.44 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Informasi Geospasial di Provinsi Kep. Bangka Belitung						
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	16.691 km ²		
02.01.05.41 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Aceh	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	55.009 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	56.782 km ²		
02.01.05.42 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kep. Riau	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	6.618 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	7.652 km ²		
02.01.05.43 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Riau	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	86.403 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	87.679 km ²		
02.02 PP: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali	5	5,20—5,55 % per tahun	41.379.311,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.45 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	1	73,26—82,99 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	1, 5	8,45 %		
02.02.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	6.716.783,3	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	10 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	3 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	3 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	2 jumlah KI		
02.02.01.01 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	2.779.496,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU)
02.02.01.02 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Kendal	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap	5	>1	1.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.46 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah				KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.02.01.03 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	315.344,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, PEMDA (DAK FISIK)
02.02.01.04 PRO-P: Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta	5	>1	540.173,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.47 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
						KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.02.01.05 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	495.213,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), PEMDA (DAK FISIK)
02.02.01.06 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	8.597,5	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.02.01.07 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	20.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.48 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.01.08 PRO-P: Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Terlaksananya peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali	5	>1	283.447,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, PEMDA (DAK FISIK)
02.02.01.09 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	1.590.491,1	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), PEMDA (DAK FISIK)
02.02.01.11 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Subang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Subang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	-	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.49 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.01.12 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	682.519,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.02.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	3 - 4 %	409.698,3	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	3 - 5 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1 - 2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	2 - 4 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	2 - 4 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2 - 4 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.50 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4 - 6 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	8 - 10 %		
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1 - 2 %		
02.02.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - lada, pala, cengkeh	5	3 - 5 %	1.663,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - kopi	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - kelapa	5	1 - 2 %	5.384,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - tebu	5	4 - 6 %	7.423,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - garam	5	10 - 12 %	3.249,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.51 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.07 PRO-P: Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - tebu	5	1 - 2 %	9.589,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - kopi	5	7 - 9 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - garam	5	10 - 12 %	5.780,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - tebu	5	4 - 6 %	1.660,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.11 PRO-P: Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - tebu	5	1 - 2 %	17.230,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.12 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - garam	5	10 - 12 %	4.400,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.52 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahuan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten - kopi	5	1 - 2 %	78.827,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kopi	5	2 - 4 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.18 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kelapa	5	1 - 2 %	712,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kakao	5	1 - 2 %	2.277,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.23 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - perikanan budidaya	5	3 - 5 %	13.600,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.24 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.53 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - perikanan budidaya	5	4 - 6 %	251.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.27 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - perikanan tangkap	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.28 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - perikanan budidaya	5	2 - 4 %	3.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.29 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten - perikanan budidaya	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.30 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	3.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (angka perhitungan sementara)	5	60,14	32.619.727,8	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (angka perhitungan sementara)	5	41,87		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (angka perhitungan sementara)	5	43,24		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.54 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (angka perhitungan sementara)	5	44,31		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (angka perhitungan sementara)	5	44,22		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Magelang (angka perhitungan sementara)	5	49,09		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (angka perhitungan sementara)	5	50,06		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (angka perhitungan sementara)	5	45,57		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (angka perhitungan sementara)	5	47,24		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (angka perhitungan sementara)	5	76,11		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (angka perhitungan sementara)	5	43,50		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.55 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah-an Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (angka perhitungan sementara)	5	51,35		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (angka perhitungan sementara)	5	45,84		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (angka perhitungan sementara)	5	46,72		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (angka perhitungan sementara)	5	44,81		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (angka perhitungan sementara)	5	47,79		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Maja (angka perhitungan sementara)	5	31,06		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cilegon (angka perhitungan sementara)	5	63,10		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (angka perhitungan sementara)	5	55,31		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Denpasar (angka perhitungan sementara)	5	67,71		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.56 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	4 WM		
	03 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	14 kota		
	04 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
	05 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.02.03.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.922.698,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
02.02.03.06 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	3.747.904,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.02.03.07 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.470.891,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.57 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	443.565,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.02.03.09 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.998.354,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), PEMDA (DAK FISIK)
02.02.03.10 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 kota	1.031.175,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.02.03.11 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	13.803.933,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.58 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.03.12 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Timur	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	278.989,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.02.03.13 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	5 kota	4.319.809,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), PEMDA (DAK FISIK)
02.02.03.15 PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Banten	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	369,7	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.03.16 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Banten	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	68.769,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.03.17 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Banten	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	3.163.383,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.59 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.03.18 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Bali	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	369.884,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu dan Kawasan Perdesaan	01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Jawa-Bali	1, 5	69,76	369.802,2	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	63,56		
		03 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Jawa-Bali	1	12,00 - 12,30 %		
02.02.04.04 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Barat	1, 5	72,00	4.088,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.04.05 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Tengah	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah	1, 5	71,10	4.240,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.04.06 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi DI Yogyakarta	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi DI Yogyakarta	1, 5	78,40	750,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.04.07 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Timur	1, 5	71,00	8.765,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.60 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.04.08 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Banten	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Banten	1, 5	65,10	894,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.04.09 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Bali	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bali	1, 5	75,80	-	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.04.10 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sukabumi	1, 5	55,25	4.346,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.04.11 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Magelang dan Kendal	1, 5	64,55	11.691,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.04.12 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pamekasan dan Banyuwangi	1, 5	83,00	6.464,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pandeglang	1, 5	74,85	75.062,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.61 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.04.14 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Buleleng dan Klungkung	1, 5	69,36	6.382,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.04.15 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	50,00 %	247.116,6	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL
02.02.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,44 nilai	1.263.300,3	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	67,10 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	101 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	73 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	9.514 dokumen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.62 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	19 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	73 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	85,93 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.683.409 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	629.581 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	53 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	39 persetujuan substansi RDTR		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.63 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	13 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	12 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	2 perkara		
	12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	134.171 km ²		
		02 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	3.026 desa		
		03 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 layanan		
		04 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	16.345 km ²		
02.02.05.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi DKI Jakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	294 dokumen	66.088,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.64 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	77,67 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	100 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	1 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	1 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	1 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.06 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	213 bidang	197.293,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	213 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta dasar pertanahan	01 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	2.022.250 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.65 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.492 dokumen	2.312,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	87,40 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	53 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	23 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	16 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.66 -

PN/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	962.960 bidang	343.673,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	633.627 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	156.099 bidang		
02.02.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	4.288,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	2 perkara		
02.02.05.10 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	802 desa	77.698,7	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.67 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	37.020 km ²		
	03 - Terlaksananya layanan data center	01 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 layanan		
02.02.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.596 dokumen	2.104,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	86,60 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	63 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	29 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.68 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.05.12 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	790.400 bidang	277.808,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	489.420 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	385.526 bidang		
02.02.05.13 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 rekomendasi kebijakan	4.718,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	11 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.14 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	836 desa	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.69 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	34.332 km ²		
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	5.380 km ²		
02.02.05.15 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	604 dokumen	2.782,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93,49 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	74 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.70 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	4	1 rekomendasi		
02.02.05.16 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	4.400 bidang	6.296,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	4.400 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	43.080 bidang		
02.02.05.17 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.237,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.18 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.872 dokumen	2.241,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.71 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	85,87 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	80 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	28 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	20 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	20 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.19 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	593.750 bidang	229.572,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.72 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	275.400 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	191.066 bidang		
02.02.05.20 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	14 rekomendasi kebijakan	6.098,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	13 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.21 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Timur	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	1.019 desa	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	45.531 km ²		
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	7.072 km ²		
02.02.05.22 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	869 dokumen	1.780,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.73 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Banten	yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)					
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,68 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	46 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.23 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	18.000 bidang	10.362,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.74 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	8.930 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	8.730 bidang		
02.02.05.24 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Banten	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.152,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.25 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Banten	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	369 desa	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	9.340 km ²		
02.02.05.26 PRO-P: Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bali	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	786 dokumen	2.324,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	88,81 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.75 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	54 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.27 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	58.660 bidang	20.544,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	4.580 bidang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.76 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	16.010 bidang		
02.02.05.28 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bali	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	9 rekomendasi kebijakan	2.261,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.29 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi DI. Yogyakarta	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	3.176 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	3.176 km ²		
02.02.05.30 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Bali	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	4.761 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	717 km ²		
02.02.05.31 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan	661,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.77 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.32 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi DKI Jakarta	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	11 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.03 PP: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara	5	5,12-5,47 % per tahun	2.357.232,8	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	1	66,87-70,20 nilai minimum-nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara	1	16,75 %		
02.03.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	1.062.305,5	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.78 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.01.01 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPE) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	>1	625.276,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, PEMDA (DAK FISIK)
02.03.01.02 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPE) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	>1	437.029,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPB), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.79 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	1 - 2 %	17.937,4	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1 - 2 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	1 - 2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	1 - 2 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	1 - 2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	10 - 12 %		
02.03.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kelapa	5	1 - 2 %	1.234,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - tebu	5	1 - 3 %	2.650,5	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.80 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - garam	5	10 - 12 %	4.400,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kelapa	5	1 - 3 %	2.852,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - perikanan budidaya	5	1 - 2 %	3.400,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - perikanan tangkap	5	1 - 3 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.16 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - perikanan budidaya	5	1 - 3 %	3.400,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (angka perhitungan sementara)	5	45,50	46.619,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.81 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (angka perhitungan sementara)	5	45,07		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota		
02.03.03.02 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	17.715,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.03.03.03 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	28.904,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.03.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Nusa Tenggara	1, 5	57,50	1.156.009,2	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	54,37		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Nusa Tenggara	5	49,48		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Nusa Tenggara	1	19,80 - 20,20 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.82 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan)		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	18 kecamatan		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,48 IPKP		
02.03.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	18 kecamatan	59.693,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.03.04.11 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	25,10 - 25,60 %	31.432,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	67,70 - 68,20		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.83 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.04.12 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	24,90 - 25,40 %	921.376,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	63,90 - 64,40		
02.03.04.14 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua	5	0,44 IPKP	55.510,4	KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.03.04.15 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu	5	0,52 IPKP	12.792,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK) (Memiliki proyek berstatus PSN)
02.03.04.16 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	1, 5	54,30	14.049,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.03.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat	1, 5	71,35	1.562,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.84 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	1, 5	63,44	20.521,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.03.04.19 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	1, 5	51,20	10.523,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.03.04.20 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	50 %	876,7	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL
02.03.04.21 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	57,57	22.267,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, PEMDA (DAK FISIK)
02.03.04.22 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	44,08	5.401,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.03.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,14 nilai	74.360,8	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.85 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30,50 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	25 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	19 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.343 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	19 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	79,90 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.86 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	843.168 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	101.979 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	12 materi teknis dan Ranperkada		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	6 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
	12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	1.429 km ²		
02.03.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	695 dokumen	2.644,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.87 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	74,82 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	28 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	16 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.03.05.12 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	648 dokumen	2.312,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.88 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	84,96 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	33 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.03.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	52.400 bidang	32.496,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	39.954 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	23.138 bidang		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.89 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	90.130 bidang	30.890,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	42.350 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	38.830 bidang		
02.03.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperkada	3.332,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 persetujuan substansi RTRW		
02.03.05.16 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	8 materi teknis dan Ranperkada	2.684,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR Kab/Kota		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.90 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.05.18 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	1.429 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.04 PP: Pembangunan Wilayah Kalimantan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	5	5,22—5,52 % per tahun	1.935.267,8	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan	1	69,60—78,11 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	1	5,15 %		
02.04.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	29.187,2	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	5 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan revitalisasi	5	2 jumlah destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		05 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	2 jumlah KI		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.91 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.01.01 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Ketapang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1	22.472,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
02.04.01.02 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1	3.714,5	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), PEMDA (DAK FISIK)
02.04.01.03 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Surya Borneo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	5	>1	-	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.04.01.04 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur	5	>1	-	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.92 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.01.05 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur	5	>1	3.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KPBU)
02.04.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	1 - 2 %	31.890,8	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - karet	5	2 - 3 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	1 - 2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4 - 6 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1 - 2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	5	4 - 6 %		
02.04.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - karet	5	1 - 2 %	1.515,7	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.93 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - lada, pala, cengkeh	5	3 - 5 %	3.794,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kelapa sawit	5	5 - 7 %	1.047,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - kelapa sawit	5	5 - 7 %	1.047,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - kelapa sawit	5	4 - 6 %	1.025,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - karet	5	4 - 6 %	7.780,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - kelapa sawit	5	5 - 7 %	759,1	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.94 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - lada, pala, cengkeh	5	1 - 2 %	5.018,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - kelapa sawit	5	5 - 7 %	944,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.23 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - lada, pala, cengkeh	5	1 - 2 %	1.888,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.26 PRO-P: Pengembangan komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.28 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - perikanan budidaya	5	5 - 7 %	7.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.95 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.02.30 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - perikanan budidaya	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - perikanan tangkap	5	1 - 3 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.32 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - perikanan budidaya	5	5 - 7 %	70,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (angka perhitungan sementara)	5	46,28	634.547,8	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (angka perhitungan sementara)	5	40,70		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (angka perhitungan sementara)	5	47,81		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Banjarmasin (angka perhitungan sementara)	5	39,28		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.96 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Ibu Kota Negara (angka perhitungan sementara)	5	39,70		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (angka perhitungan sementara)	5	52,04		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (angka perhitungan sementara)	5	48,52		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (angka perhitungan sementara)	5	38,18		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tarakan (angka perhitungan sementara)	5	48,76		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
	05 - Terbangunnya Ibu Kota Negara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Negara	5	5.600 ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.97 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.04.03.02 PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	123.607,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.04.03.03 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	22.888,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	02 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02.04.03.04 PRO-P: Pembangunan Ibu Kota Negara	01 - Terbangunnya Ibu Kota Negara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Negara	5	5.600 ha	166.854,3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.04.03.05 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	98.308,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.98 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.03.06 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	18.170,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PEMDA (DAK FISIK)
02.04.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	199.458,6	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.04.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	5.259,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.04.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Kalimantan	1, 5	56,84	1.019.109,5	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	52,25		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Kalimantan	5	54,64		
		04 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	1	6,90 - 7,10 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.99 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,44 IPKP		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	10 kecamatan		
02.04.04.06 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Barat	1, 5	55,15	440,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.07 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	1, 5	58,92	62.431,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.08 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	5	60,34	5.455,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.09 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Barat	5	4 kecamatan	109.755,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.100 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.10 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk	5	0,47 IPKP	352.577,7	KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTANIAN, PEMDA (DAK FISIK) (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
02.04.04.11 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang	5	0,36 IPKP	90.401,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Tengah	1, 5	58,10 nilai	-	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kotawaringin Barat	1, 5	59,60	1.428,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.14 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang mendukung Pengembangan <i>Food Estate</i> sesuai Direktif Presiden dalam rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang mendukung Pengembangan <i>Food Estate</i> sesuai Direktif Presiden dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah	5	26,50	47,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.101 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Mendukung <i>Food Estate</i> Provinsi Kalimantan Tengah	5	52,94		
02.04.04.15 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Selatan	1, 5	64,30	160,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.16 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barito Kuala dan Banjar	1, 5	66,90	1.442,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.17 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kalimantan Selatan	5	68,06	1.401,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.18 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Timur	1, 5	62,72	1.335,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.19 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Berau dan Kutai Timur	1, 5	58,92	3.512,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.102 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.20 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur	5	55,60	6.941,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.21 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Utara	1, 5	52,10	-	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.22 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bulungan dan Nunukan	1, 5	52,75	2.960,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.04.23 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	5	52,50	12.246,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.24 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Utara	5	5 kecamatan	1.179,9	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.25 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	5	0,40 IPKP	52.477,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.26 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	5	0,40 IPKP	83.417,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.103 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.27 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis	5	0,40 IPKP	90.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.28 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang	5	0,63 IPKP	139.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.29 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Timur	5	1 kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,2 nilai	220.532,5	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30,80 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	48 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	39 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3.558 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	9 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.104 -

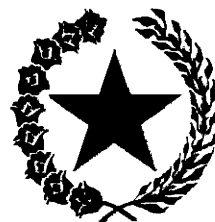
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	39 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	4 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,80 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	2.640.594 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	2.590.611 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	44 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	16 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	13 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	10 persetujuan substansi RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.105 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis PK/Revisi RTRWN	5	1 materi teknis dan RPP		
		09 - Jumlah materi teknis RDTR Rencana IKN	5	1 materi teknis dan Raperpres		
		10 - Jumlah dokumen harmonisasi rancangan peraturan perundangan RDTR calon IKN	5	4 Raperpu RDTR IKN		
	12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	137.014 km ²		
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	502.885 km ²		
02.04.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.177 dokumen	2.442,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	78,07 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.106 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	13 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	17.320 bidang	43.009,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	11.660 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	94.670 bidang		
02.04.05.06 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	12 rekomendasi kebijakan	3.072,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.107 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.019 dokumen	2.171,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	80,51 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	31 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.108 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	20.560 bidang	35.558,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	2.550 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	4.620 bidang		
02.04.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	3.248,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.10 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.005 dokumen	3.216,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,08 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.109 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	11 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.11 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	44.900 bidang	50.997,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	18.410 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	7.720 bidang		
02.04.05.12 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan	5.923,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.110 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.13 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	71 dokumen	2.280,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	86,91 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	51 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.111 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	47.900 bidang	62.977,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	37.740 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	119.800 bidang		
02.04.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	11 rekomendasi kebijakan	2.194,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis PK/Revisi RTRWN	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah materi teknis RDTR Rencana IKN	5	1 rekomendasi kebijakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.112 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN	5	4 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	286 dokumen	2.526,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,42 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	5 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.113 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.18 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan	914,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.19 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	146.364 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.04.05.20 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	408 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	147.188 km ²		
02.04.05.21 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	4 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	29.522 km ²		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.114 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.05.22 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Cakupan peta RBI skala 1:5.000	2	1.393 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	112.451 km ²		
02.04.05.23 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	2	67.360 km ²	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.05 PP: Pembangunan Wilayah Sulawesi	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi	5	6,58—7,07 % per tahun	2.924.511,0	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi	1	67,72—74,48 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi	1	9,58 %		
02.05.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	426.291,5	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	7 kawasan		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.115 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	1 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	3 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	1 jumlah KI		
02.05.01.01 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Bitung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1	-	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.05.01.02 PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Terlaksananya percepatan operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1	64.326,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
02.05.01.03 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Palu	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah	5	>1	-	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.116 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.01.04 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1	89.036,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMDA (DAK FISIK)
02.05.01.05 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tenggara	5	>1	272.928,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, PEMDA (DAK FISIK)
02.05.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	1 - 3 %	69.276,0	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	2 - 4 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1 - 2 %		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.117 -

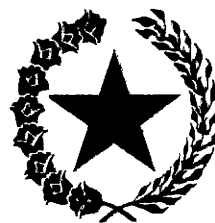
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1 - 2 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1 - 2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	4 - 6 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2 - 4 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	1 - 2 %		
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	10 - 12 %		
		10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	5	4 - 6 %		
02.05.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kelapa	5	1 - 2 %	1.524,2	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.118 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - lada, pala, cengkeh	5	5 - 7 %	3.636,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kopi	5	1 - 3 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.05 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kakao	5	1 - 2 %	5.648,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - lada, pala, cengkeh	5	1 - 3 %	251,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kelapa	5	1 - 2 %	1.680,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kakao	5	1 - 2 %	22.385,5	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.119 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.11 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - lada, pala, cengkeh	5	4 - 6 %	1.178,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.12 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kelapa	5	1 - 2 %	2.433,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kakao	5	1 - 2 %	9.890,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - lada, pala, cengkeh	5	5 - 7 %	6.761,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.16 PRO-P: Pengembangan Komoditas Kopi di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kopi	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kelapa	5	1 - 2 %	3.197,0	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.120 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - kelapa	5	1 - 2 %	1.872,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.21 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Pala di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - pala, lada, cengkeh	5	4 - 6 %	541,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kopi	5	8 - 10 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.23 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kakao	5	1 - 2 %	2.238,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.25 PRO-P: Pengembangan komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kelapa sawit	5	4 - 6 %	1.025,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.26 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - perikanan tangkap	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.30 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - perikanan tangkap	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.121 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.02.32 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - perikanan budidaya	5	4 - 6 %	280,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - garam	5	10 - 12 %	3.022,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.33 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - perikanan tangkap	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.34 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - perikanan budidaya	5	1 - 2 %	210,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.35 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - perikanan tangkap	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.37 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - perikanan tangkap	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.122 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.02.38 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - perikanan budidaya	5	4 - 6 %	1.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (angka perhitungan sementara)	5	48,40	1.493.671,0	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (angka perhitungan sementara)	5	46,54		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (angka perhitungan sementara)	5	48,40		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (angka perhitungan sementara)	5	50,62		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (angka perhitungan sementara)	5	44,11		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (angka perhitungan sementara)	5	45,77		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (angka perhitungan sementara)	5	40,26		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.123 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Mamuju (angka perhitungan sementara)	5	35,04		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02.05.03.03 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	31.963,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02.05.03.04 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	500.774,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.05.03.05 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	657.877,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPB), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.124 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.03.06 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	19.524,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
02.05.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	91.440,1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.05.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Gorontalo	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	67.354,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.05.03.09 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	124.736,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.05.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Sulawesi	1, 5	61,67	743.560,4	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	52,92		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.125 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sulawesi	5	57,24		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Sulawesi	1	12,90 - 13,10 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan)		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,46 IPKP		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	15 kecamatan		
02.05.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Utara	5	11 kecamatan	750,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.08 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Utara	1, 5	63,25	325,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.126 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.09 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Minahasa Utara	1, 5	62,93	2.403,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.10 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna	5	0,48 IPKP	10.299,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.05.04.11 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane	5	0,44 IPKP	625,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tengah	1, 5	62,15	3.468,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morowali, Buol, dan Poso	1, 5	52,40	7.080,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.14 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah	5	54,70	9.354,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.15 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	15,00 - 15,50 %	84.819,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.127 -

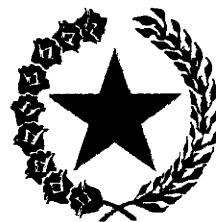
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	68,20 - 68,70 nilai indeks		
02.05.04.16 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	50 %	539.023,1	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN SOSIAL
02.05.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Selatan	1	64,70 nilai indeks	1.160,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	1, 5	55,13	14.365,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.19 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	5	53,75	12.885,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.128 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.20 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tenggara	1, 5	59,10	1.162,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.21 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	1, 5	48,54	9.181,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.22 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	5	53,93	15.626,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.23 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Gorontalo	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Gorontalo	1, 5	66,61	575,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.24 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	1, 5	64,65	8.880,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.25 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo	5	61,28	8.573,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.129 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.26 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi	1, 5	59,40	570,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.27 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah	1, 5	47,42	4.809,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.28 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat	5	66,94	7.621,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.29 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Tengah	5	3 kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.30 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Gorontalo	5	1 kecamatan	-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,17 nilai	191.712,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.130 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	31,50 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	67 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	51 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	5.352 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	51 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	5 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,80 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.131 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.502.635 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	831.820 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	35 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	14 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	11 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	8 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	1 perkara		
02.05.05.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.004 dokumen	2.743,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.132 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	85,25 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	15 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.06 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	37.780 bidang	25.367,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.133 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	31.000 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	6.640 bidang		
02.05.05.07 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	3.598,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.09 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.542 dokumen	2.481,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,43 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.134 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	31 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.10 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	41.900 bidang	26.263,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	33.400 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	21.960 bidang		
02.05.05.11 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.982,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.135 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	1 perkara		
02.05.05.12 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.204 dokumen	2.609,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,07 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	56 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	17 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.136 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	13 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	206.810 bidang	63.922,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	123.608 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	32.820 bidang		
02.05.05.14 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	14 rekomendasi kebijakan	3.274,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.137 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	680 dokumen	2.240,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,96 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	14 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	10 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.138 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.05.17 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	57.190 bidang	28.736,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	32.250 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	5.697 bidang		
02.05.05.18 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	5 rekomendasi kebijakan	1.334,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.20 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Gorontalo	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	431 dokumen	2.275,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	85,17 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.139 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.21 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	53.700 bidang	9.762,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	17.240 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	2.235 bidang		
02.05.05.22 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.357,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.140 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.23 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	491 dokumen	2.343,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	80,96 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.141 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.24 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	32.800 bidang	10.645,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	17.470 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	6.524 bidang		
02.05.05.25 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	772,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.06 PP: Pembangunan Wilayah Maluku	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku	5	6,66—6,99 % per tahun	725.536,8	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Maluku	1	70,92—71,08 nilai minimum—nilai maksimum		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.142 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	1	12,19 %		
02.06.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1 nilai	273.676,7	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 jumlah destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		05 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	1 jumlah KI		
02.06.01.01 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1	224.051,1	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL , KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.143 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.01.02 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1	49.625,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
02.06.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	4 - 6 %	15.062,0	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1 - 2 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	2 - 4 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2 - 4 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4 - 5 %		
02.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - lada, pala, cengkeh	5	4 - 6 %	2.331,4	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.144 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - kelapa	5	4 - 6 %	6.620,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.06.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - kelapa	5	4 - 6 %	1.389,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.06.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - lada, pala, cengkeh	5	1 - 2 %	2.720,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.06.02.05 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan budidaya	5	4 - 6 %	1.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - perikanan tangkap	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - perikanan budidaya	5	5 - 7 %	1.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.145 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (angka perhitungan sementara)	5	63,43	202.084,5	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (angka perhitungan sementara)	5	45,46		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (angka perhitungan sementara)	5	45,86		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sofifi (angka perhitungan sementara)	5	39,07		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	33.166,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.06.03.02 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	32.026,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.146 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.03.03 PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Maluku Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	136.891,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.06.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Maluku	1, 5	52,82	189.324,6	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	56,59		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Maluku	5	34,52		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Maluku	1	17,40 - 17,60 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan)		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,49 IPKP		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.147 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	16 kecamatan		
02.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku	5	11 kecamatan	13.064,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, PEMDA (DAK FISIK)
02.06.04.11 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	1	21,90 - 22,40 %	73.649,0	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	1	65,2 - 65,7 nilai indeks		
02.06.04.12 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	6,80 - 7,30 %	18.323,6	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	63,5 - 64 nilai indeks		
02.06.04.14 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki	5	0,47 IPKP	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.148 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.04.15 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba	5	0,50 IPKP	13.912,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.06.04.16 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku	1, 5	54,50	24.577,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku Utara	1	54,80	13.952,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Maluku Tengah	1, 5	54,62	4.884,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.04.19 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morotai	1, 5	60,04	1.540,5	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.04.20 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku	5	42,61	12.359,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, PEMDA (DAK FISIK)
02.06.04.21 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	5	30,48	1.547,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.149 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.04.22 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku Utara	5	5 kecamatan	11.512,9	PEMDA (DAK FISIK)
02.06.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,95 nilai	45.389,0	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	18 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	15 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.432 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	15 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	2 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.150 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	81,38 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	294.231 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	206.930 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	15 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	5 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
02.06.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	391 dokumen	2.587,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.151 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	82,03 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.06.05.12 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.041 dokumen	2.588,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.152 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	80,73 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.06.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	28.440 bidang	13.391,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.153 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	17.248 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	3.170 bidang		
02.06.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	24.690 bidang	20.386,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	15.513 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	852 bidang		
02.06.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	7 materi teknis dan Ranperkada	2.705,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
02.06.05.16 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku Utara	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	8 materi teknis dan Ranperkada RDTR	3.729,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.154 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 persetujuan substansi RTRW		
02.07 PP: Pembangunan Wilayah Papua	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua	5	5,92—6,26 % per tahun	10.842.589,1	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Papua	1	62,06—65,92 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	1	23,84 %		
02.07.01 KP: Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	267.587,0	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	4 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 jumlah destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	1 jumlah destinasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.155 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	1 jumlah KI		
02.07.01.01 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua	5	>1	42.247,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, PEMDA (DAK FISIK)
02.07.01.02 PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	194.339,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
02.07.01.03 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Sorong	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Sorong	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	30.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.156 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.01.04 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Bintuni	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Teluk Bintuni	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
02.07.02 KP: Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	1 - 2 %	1.270.343,9	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	2 - 4 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1 - 2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2 - 4 %		
02.07.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - kakao	5	1 - 2 %	3.528,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - kopi	5	5 - 7 %	-	KEMENTERIAN PERTANIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.157 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - lada, pala, dan cengkeh	5	1 - 2 %	2.460,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - kakao	5	1 - 2 %	3.722,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - perikanan tangkap	5	4 - 6 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.02.11 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - perikanan	5	1 - 2 %	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.02.12 PRO-P: Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah populasi ternak sapi	5	N/A ekor	1.260.633,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Jumlah hasil produksi tanaman hortikultura (sayur) Provinsi Papua	5	9,50 ton		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.158 -

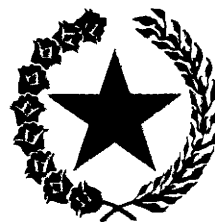
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Luas areal tanaman perkebunan	5	200 ha		
		04 - Jumlah hasil produksi tanaman perkebunan	5	126.215 ton		
		05 - Nilai Tukar Petani subsektor tanaman pangan Provinsi Papua	5	97,58		
		06 - Nilai Tukar Petani subsektor hortikultura Provinsi Papua	5	N/A		
		07 - Nilai Tukar Petani subsektor Peternakan Provinsi Papua	5	99,98		
		08 - Nilai Tukar Petani subsektor tanaman perkebunan rakyat Provinsi Papua	5	99,98		
		09 - Nilai Tukar Petani subsektor perikanan Provinsi Papua	5	100,89		
		10 - Nilai Tukar Petani subsektor peternakan Provinsi Papua Barat	5	102,14		
		11 - Nilai Tukar Petani subsektor perkebunan rakyat Provinsi Papua Barat	5	121,11		
		12 - Nilai Tukar Petani subsektor hortikultura Provinsi Papua Barat	5	120,98		
		13 - Nilai Tukar Petani subsektor tanaman pangan Provinsi Papua Barat	5	109,15		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.159 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		14 - Nilai Tukar Nelayan Provinsi Papua Barat	5	111,84		
	02 - Meningkatnya ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Barat	5	113,21		
		02 - Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua	5	99,61		
		03 - Persentase pengeluaran makanan berpendapatan rendah Provinsi Papua	5	N/A %		
		04 - Persentase rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan Provinsi Papua	5	N/A %		
		05 - Persentase rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan Provinsi Papua Barat	5	49,30 %		
		06 - Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari Provinsi Papua	5	N/A gram		
		07 - Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari Provinsi Papua Barat	5	57 gram		
	03 - Meningkatnya sektor ekonomi wilayah adat dan kawasan strategis di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	5	4,00 - 4,40 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.160 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	5	5 - 7 %		
		03 - Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat	5	7 %		
		04 - Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	5	7,00 - 10,20 %		
		05 - Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	5	5 - 6 %		
		06 - Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua	5	5,00 - 6,50 %		
		07 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi	5	>1		
	04 - Meningkatnya sektor pariwisata di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 jumlah destinasi		
		02 - Proporsi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB	5	N/A %		
02.07.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jayapura (angka perhitungan sementara)	5	45,40	38.350,6	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sorong (angka perhitungan sementara)	5	38,99		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.161 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.07.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Papua	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	11.233,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
02.07.03.02 PRO-P: Pembangunan kota baru di Provinsi Papua Barat	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	27.116,7	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.07.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Papua	1, 5	34,22	9.201.648,5	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	40,36		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Papua	5	36,28		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Papua	1	34,80 - 34,95 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.162 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A (Sesuai PP 78/2014, evaluasi penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali pada akhir RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal 2022 belum dapat ditentukan)		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,52 IPKP		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	17 kecamatan		
02.07.04.01 PRO-P: SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua	01 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah sekolah berpola asrama yang beroperasi	1	3 unit	284.481,1	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		02 - Jumlah pelajar Papua menerima bantuan biaya pendidikan	1	34.370 orang		
		03 - Jumlah guru yang terpenuhi di Wilayah Papua	1	4.487 orang		
	02 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah kab/kota yang mencapai API < 1/1.000 penduduk	1	42 kab/kota		
		02 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	89 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.163 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1%	1	42 kab/kota		
		04 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	80 %		
		05 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	90 %		
	03 - Meningkatnya perlindungan anak, perempuan, dan keluarga miskin dan partisipasi pemuda di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	1	361.305 keluarga		
		02 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh layanan psikososial	1	3.000 jiwa		
02.07.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua	5	15 kecamatan	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.04.04 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Papua	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Papua	1, 5	32,25 nilai	4.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.07 PRO-P: Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	2	61,7 km	8.668.572,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.164 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah pelabuhan laut yang dikembangkan	2	2 lokasi		
		03 - Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dikembangkan	2	3 lokasi		
		04 - Jumlah bandara yang dikembangkan	2	5 lokasi		
	02 - Meningkatnya akses infrastruktur dasar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	01 - Persentase akses air minum layak di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	91 %		
		02 - Persentase akses rumah layak huni di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	49 %		
		03 - Rasio elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	100 %		
		04 - Jumlah desa <i>blankspot</i> yang terlayani infrastruktur TIK di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	2.439 desa		
02.07.04.08 PRO-P: Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Air	1	55,30	81.610,4	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Indeks Kualitas Air Laut	1	59,50		
		03 - Indeks Kualitas Udara	1	84,30		
		04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	1	63,50		
	02 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Perubahan Iklim	01 - Indeks Risiko Bencana	1	122,9		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.165 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	1	4 menit		
	03 - Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca terhadap <i>Baseline</i>	01 - Persentase penurunan emisi GRK nasional terhadap <i>baseline</i>	1	26,60 %		
		02 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK nasional terhadap <i>baseline</i>	1	29,30 %		
02.07.04.26 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Jayapura dan Merauke	1, 5	43,25	97.073,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.07.04.27 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua	5	38,85	4.081,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.29 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura	5	0,41 IPKP	41.600,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.07.04.30 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke	5	0,61 IPKP	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.166 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.31 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah	5	0,53 IPKP	7.341,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.07.04.33 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Raja Ampat dan Manokwari	1, 5	36,45	7.173,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.07.04.34 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	5	32,44	5.215,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.36 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Papua Barat	1, 5	39,75	-	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.37 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Barat	5	2 kecamatan	-	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.05 KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatkan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,50 nilai	64.659,0	
	02 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	03 - Meningkatkan daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	29 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.167 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	25 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.097 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	25 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	77,79 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	459.916 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	531.640 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	15 materi teknis dan Ranperkada		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	7 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	3 materi teknis dan Ranperda		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.168 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	1 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	1 perkara		
02.07.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	650 dokumen	4.507,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	78,31 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	10 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.169 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 rekomendasi		
02.07.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	7.000 bidang	7.338,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	1.626 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	900 bidang		
02.07.05.06 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	4 materi teknis dan Ranperkada	2.494,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
02.07.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (<i>e-gov</i>)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	447 dokumen	3.029,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	77,26 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.170 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	24 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	19 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	16 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 rekomendasi		
02.07.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	13.230 bidang	13.866,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	3.785 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	3.570 bidang		
02.07.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	11 materi teknis dan Ranperkada	3.828,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.171 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	5	4 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota	5	1 materi teknis dan Ranperda		
02.07.05.10 PRO-P: Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM	01 - Meningkatnya afirmasi ASN melalui Manajemen Talenta ASN di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah SDM ASN orang asli Papua di K/L	1	250 orang	29.594,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		02 - Jumlah SDM orang asli Papua di sekolah kedinasan	1	250 orang		
	02 - Narasi Tunggal Papua	01 - Jumlah narasi pembangunan Papua	1, 2, 5	207 spot/kegiatan		
	03 - Diseminasi Internasional Pembangunan Papua	01 - Jumlah diseminasi internasional terkait dengan pembangunan internasional	1, 2, 5	1 spot/kegiatan		

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya dimunculkan pada salah satu ProP;
- 2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, dan KPBU, namun belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- 3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2022.
- 4) Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
 1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan Infrastruktur
 3. Penyederhanaan Regulasi
 4. Penyederhanaan Birokrasi
 5. Transformasi Ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.1 -

PRIORITAS NASIONAL 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03 PN: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	01 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	01 - Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)		2,21 per wanita usia subur usia 15-49 tahun	266.578.767,9	
		02 - Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)		99,00 %		
	02 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	01 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial		87,00 %		
		02 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		75,00 %		
	03 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	01 - Angka Kematian Ibu (AKI)		205 per 100.000 kelahiran hidup		
		02 - Angka Kematian Bayi (AKB)		18,6 per 1.000 kelahiran hidup		
		03 - Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita		18,4 %		
		04 - Insidensi <i>tuberkulosis</i>		231 per 100.000 penduduk		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		21,8 %		
		06 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		8,9 %		
		07 - Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca		394		
		08 - Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika		385		
		09 - Nilai rata-rata hasil PISA: Sains		399		
		10 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas		9,13 tahun		
		11 - Harapan lama sekolah		13,57 tahun		
	04 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	01 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)		69,87		
		02 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,11-91,22		
		03 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		55,61		
	05 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif		36,00 %		
	06 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		46,87 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 200		0 PT		
		03 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 300		1 PT		
		04 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 500		2 PT		
		05 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi		41,92 %		
		06 - Peringkat <i>Global Innovation Index</i>		80 - 85 peringkat		
03.01 PP: Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	01 - Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	1	78,00 %	5.278.268,4	
		02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	1	60,00 %		
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	80,00 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.4 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	1	97 %		
		05 - Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	1	20,00 %		
03.01.01 KP: Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	01 - Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan	01 - Jumlah pedoman/kebijakan/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disusun	1	40 pedoman/kebijakan/SOP	8.398,6	
03.01.01.01 PRO-P: Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan	01 - Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	01 - Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	1.542 inovasi	6.398,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, MAHKAMAH AGUNG
		02 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	1	100 %		
		03 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	1	100 %		
		04 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	1	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.01.01.02 PRO-P: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Kelompok Khusus	01 - Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	01 - Jumlah daerah di wilayah 3T yang mendapatkan peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif	1	50 daerah	2.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya	1	60 %		
03.01.02 KP: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan	01 - Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	1	1 sistem	1.074.596,9	
03.01.02.01 PRO-P: Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi data administrasi kependudukan	01 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	3.000 lembaga pengguna	4.013,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	900 lembaga pengguna		
03.01.02.02 PRO-P: Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan (Statistik Hayati) yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu	01 - Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap, dan tepat waktu	01 - Jumlah <i>database</i> kependudukan yang update	1	1 <i>database</i>	1.070.583,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN PUSAT STATISTIK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.01.03 KP: Pendampingan dan Layanan Terpadu	01 - Meningkatnya kualitas pendampingan dan layanan terpadu	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	1	78 %	3.980.157,9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	1	60 %		
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	80 %		
		04 - Persentase pengembangan standar nasional pendamping pembangunan (%)	1	100 %		
		05 - Persentase penyetaraan jenjang kualifikasi pendamping pembangunan yang dikembangkan (%)	1	40 %		
		06 - Persentase kementerian/ lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	1	20 %		
03.01.03.01 PRO-P: Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	01 - Terlaksananya dan rujukan bagi penduduk miskin dan rentan	01 - Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan SLRT (kabupaten/kota)	1	364 kab/kota	2.155.610,2	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial	1	728 desa/kelurahan		
03.01.03.02 PRO-P: Penguatan Pendampingan Masyarakat	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendamping pembangunan	01 - Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas dan kemampuannya (orang)	1	22.000 orang	1.824.547,7	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tereakreditasi	1	6.000 lembaga		
	02 - Terlaksananya pendampingan melalui pendamping desa	01 - Jumlah pendamping desa yang diberdayakan	1	36.000 orang		
03.01.04 KP: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	01 - Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	01 - Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	1	52,6	215.115,0	
03.01.04.01 PRO-P: Sinergitas Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	01 - Meningkatnya sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	01 - Persentase pemerintah daerah yang mempergunakan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	1	60 %	1.287,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.01.04.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Kependudukan	01 - Menguatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	01 - Persentase pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berawasan kependudukan	4	60 %	1.831,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.01.04.03 PRO-P: Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	01 - Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan	01 - Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangsa Kencana	4	63,41	211.997,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.02 PP: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	01 - Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	01 - Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1	87,00 %	149.014.487,8	
		02 - Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	1	13,00 %		
		03 - Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia	1	10,50 %		
		04 - Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif	1	11,65 %		
		05 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Formal	1	56,19 %		
		06 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Informal	1	13,06 %		
03.02.01 KP: Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	01 - Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial	1	5 dokumen	46.493.900,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.02.01.01 PRO-P: Pengembangan Program Jaminan Sosial	01 - Terlaksananya pengembangan program jaminan sosial	01 - Jumlah strategi sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik terpadu sistem jaminan sosial nasional	1	1 dokumen	46.487.400,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
		02 - Jumlah sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi jaminan sosial terpadu berbasis digital	1	1 dokumen		
03.02.01.02 PRO-P: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Jumlah agen profesional penggerak jaminan sosial (Agenalis)	01 - Jumlah agen profesional penggerak jaminan sosial (Agenalis)	1	1.000 orang	6.500,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
		02 - Persentase peserta BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek yang terintegrasi berbasis NIK	1	21 %		
03.02.02 KP: Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan	01 - Akurasi penyaluran bantuan sosial	1	50 %	96.708.318,7	
		02 - Rumah tangga miskin dan rentan dengan akses layanan keuangan	1	60 %		
		03 - Penyaluran bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	1	10.000.000 KPM		
		04 - Penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako Murah	1	18.800.000 KPM		
		05 - Penyaluran bantuan LPG 3 kg	1	15.600.000 KPM		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Penyaluran bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	1	15.600.000 KPM		
03.02.02.01 PRO-P: Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Terselenggaranya bantuan dan subsidi tepat sasaran	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	4	10.000.000 KPM	96.708.318,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KEUANGAN
		02 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan pangan melalui program Kartu Sembako Murah	1	18.800.000 KPM		
		03 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan subsidi listrik	1	15.600.000 KPM		
	02 - Tersedianya pasokan hilir migas sesuai kebutuhan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan energi LPG 3 kg	1	15.600.000 KPM		
		02 - Jumlah volume elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran	2	7.754-7.836 ribu ton		
03.02.03 KP: Perlindungan Sosial Adaptif	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang adaptif	01 - Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	578.500 jiwa	5.032.885,1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.11 -

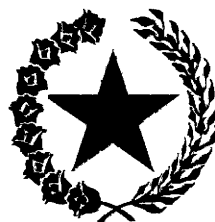
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.02.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	01 - Terlaksananya perlindungan sosial bagi penduduk korban bencana	01 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana alam	1	250.000 jiwa	5.032.885,1	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		02 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana sosial	1	20.000 jiwa		
		03 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh layanan psikososial	1	3.000 jiwa		
03.02.04 KP: Kesejahteraan Sosial	01 - Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial penduduk rentan	01 - Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	21,7 %	779.384,0	
		02 - Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	16,62 %		
		03 - Jumlah kelompok rentan lain yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	43.000 jiwa		
03.02.04.01 PRO-P: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kelembagaan bagi penyandang disabilitas	01 - Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	60.000 jiwa	341.006,1	KEMENTERIAN SOSIAL
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang memperoleh penguatan kapasitas	1	200 lembaga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	800 jiwa		
03.02.04.02 PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (Lansia Aktif dan Produktif)	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan	01 - Jumlah lanjut usia yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	60.000 jiwa	125.159,6	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang memperoleh penguatan kapasitas	1	200 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	800 jiwa		
03.02.04.03 PRO-P: Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Komunitas yang Terintegrasi (Long-Term Care)	01 - Terlaksananya perawatan jangka panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (Long Term Care)	01 - Persentase lansia yang memperoleh layanan berbasis komunitas	1	59,5 %	20.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN SOSIAL
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan sosial lanjut usia terintegrasi	1	10 kab/kota		
03.02.04.04 PRO-P: Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi korban penyalahgunaan napza	01 - Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	367.500 jiwa	293.218,3	KEMENTERIAN SOSIAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.13 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah institusi penerima wajib lapor yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	3.500 jiwa		
	02 - Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak	01 - Jumlah anak telantar yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	60.000 jiwa		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang memperoleh penguatan kapasitas	1	200 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	800 jiwa		
	03 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang	01 - Jumlah tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	7.000 jiwa		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh penguatan kapasitas	1	100 lembaga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	40 jiwa		
	04 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi orang dengan HIV	01 - Jumlah orang dengan HIV yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	4.000 jiwa		
	05 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil	01 - Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh pemberdayaan sosial	1	5.000 jiwa		
03.03 PP: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah	01 - Angka Kematian Neonatal (AKN)	1	11.6 per 1.000 kelahiran hidup	44.639.359,5	
		02 - Persentase persalinan di fasyankes	1	91,0 %		
		03 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive Prevalance Rate</i> (mCPR)	1	62,50 %		
		04 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	1	8,00 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)</i>	1	21 kelahiran hidup per 1.000 perempuan		
		06 - Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	1	7,50 %		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	365 kab/kota		
		08 - Insidensi HIV	1	0,19 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		
		09 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	71,00 %		
		10 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	85 %		
		11 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	95 %		
		12 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	65 %		
		13 - Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	1	80 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		14 - Persentase obat memenuhi syarat	1	92,25 %		
		15 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	83 %		
03.03.01 KP: Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	01 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	71,00 %	4.599.833,3	
		02 - Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	26,75 %		
03.03.01.01 PRO-P: Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	01 - Terwujudnya penurunan kematian ibu dan bayi	01 - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	1	91,0 %	3.672.631,6	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	1	452 kab/kota		
03.03.01.02 PRO-P: Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (<i>Drop Out/DO</i>)	1	23,10 %	927.201,7	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN, PEMDA (DAK FISIK)
03.03.02 KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	01 - Terlaksananya percepatan perbaikan gizi masyarakat	01 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	1	50 %	5.823.713,2	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	1	13,0 %		
03.03.02.01 PRO-P: Penurunan <i>Stunting</i>	01 - Terwujudnya penurunan <i>stunting</i>	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	1	90 %	5.823.713,2	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), PEMDA (DAK FISIK)
03.03.03 KP: Peningkatan Pengendalian Penyakit	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit	01 - Persentase orang dengan HIV-AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)	1	50 %	18.450.370,9	
		02 - Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC <i>Success Rate</i>)	1	90 %		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	365 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.18 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	95 %		
		05 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	1	458 kab/kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	1	106 kab/kota		
		07 - Jumlah desa endemis <i>schistosomiasis</i> yang mencapai eliminasi	1	19 desa		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1	232 kab/kota		
		09 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	424 kab/kota		
03.03.03.01 PRO-P: Pengendalian Penyakit Menular	01 - Terkendalinya penyakit menular	01 - Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	1	85 %	18.303.548,6	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC <i>Treatment Coverage</i>)	1	90 %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	1	484 kab/kota		
		04 - Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	95 kab/kota		
		05 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	89 %		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	1	207 kab/kota		
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	19 desa		
03.03.03.02 PRO-P: Pengendalian Penyakit Tidak Menular	01 - Terkendalinya penyakit tidak menular	01 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas	1	308 kab/kota	146.822,3	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	424 kab/kota		
03.03.04 KP: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Terlaksananya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	280 kab/kota	380.935,2	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.20 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.03.04.01 PRO-P: Pengembangan Lingkungan Sehat	01 - Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat	01 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	1	60 %	161.964,3	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	280 kab/kota		
03.03.04.02 PRO-P: Penguatan Promosi Germas	01 - Terlaksananya penguatan promosi Germas	01 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	1	40 kab/kota	218.971,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	1	50 kab/kota		
03.03.05 KP: Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Menguatnya sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	1	0 %	15.384.507,0	
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	65 %		
		03 - Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	1	80 %		
		04 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	85 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.21 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	95 %		
		06 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	92 %		
		07 - Persentase kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	1	45 %		
		08 - Persentase obat memenuhi syarat	1	92,25 %		
		09 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	83 %		
03.03.05.01 PRO-P: Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	01 - Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	1	90 %	13.212.635,1	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) sesuai standar	1	90 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.22 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	4.720 FKTP		
		04 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	1.195 FKRTL		
03.03.05.02 PRO-P: Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	1	0 %	561.970,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	65 %		
		03 - Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	1	80 %		
03.03.05.03 PRO-P: Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan	01 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	92 %	265.844,2	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	1	93 %		
03.03.05.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian, dan pengembangan kesehatan	01 - Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	1	45 lokasi	850.987,6	KEMENTERIAN KESEHATAN, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.23 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan yang disusun	1	2 dokumen		
		03 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan prioritas nasional	1	100 %		
03.03.05.05 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Terlaksananya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase obat memenuhi syarat	1	92,25 %	493.069,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	83 %		
03.04 PP: Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	01 - Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA Sederajat	1	0,81		
		02 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan Tinggi	1	0,24		
		03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Membaca	1	33 %	51.549.733,9	
		04 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Matematika	1	30 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.24 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Sains	1	42,6 %		
		06 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi	1	59,20 %		
		07 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi	1	28,30 %		
		08 - Tingkat penyelesaian pendidikan SD/MI/ sederajat	1	97,93 %		
		09 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMP/MTs/ sederajat	1	90,54 %		
		10 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat	1	69,08 %		
		11 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	1	69,63 %		
		12 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)	1	31,52 %		
03.04.01 KP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran	01 - Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	1	100 %	2.169.970,6	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.25 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	1	100 %		
03.04.01.01 PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	01 - Terlaksananya penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	01 - Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan	1	9 model kurikulum	340.852,9	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen	1	108 model pembelajaran		
03.04.01.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Pendidik	01 - Meningkatnya kompetensi pendidik	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	1	57.889 orang	1.209.399,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.01.03 PRO-P: Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan	01 - Menguatnya kualitas penilaian pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional	1	60 %	364.093,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.01.04 PRO-P: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	01 - Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan	01 - Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	1	56,25 %	218.430,1	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.01.05 PRO-P: Integrasi <i>Softskill</i> dalam Pembelajaran	01 - Terwujudnya integrasi <i>softskill</i> dalam pembelajaran	01 - Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran	1	100 %	37.194,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.26 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.04.02 KP: Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Terwujudnya pemerataan akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	1	108,37 %	31.328.384,5	
		02 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	1	94,79 %		
		03 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	1	89,36 %		
		04 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/RA/BA	1	37 %		
03.04.02.01 PRO-P: Sarana dan Prasarana Pendidikan	01 - Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan	01 - Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarannya	1	25.087 lembaga	20.203.455,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK) (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
03.04.02.02 PRO-P: Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat	01 - Terlaksananya bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	01 - Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	1	100 %	10.275.955,9	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.02.03 PRO-P: Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Terlaksananya penanganan anak tidak sekolah	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	1	411 kab/kota	36.367,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	1	337 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.27 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	1	239 kab/kota		
03.04.02.04 PRO-P: Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan 1 tahun prasekolah	01 - Jumlah kab/kota dengan APK PAUD di atas 50%	1	206 kab/kota	812.606,4	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.03 KP: Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01 - Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	18,46 %		
		02 - Persentase guru yang sesuai standar pendidik	1	91,41 %	16.882.652,2	
03.04.03.01 PRO-P: Revitalisasi LPTK	01 - Terlaksananya Revitalisasi LPTK	01 - Jumlah LPTK yang direvitalisasi	1	4 lembaga	40.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.03.02 PRO-P: Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	01 - Terlaksananya pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	1	91,41 %	387.283,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	1	89,21 %		
03.04.03.03 PRO-P: Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	01 - Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	2.266 satuan pendidikan	506.603,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	6.797 satuan pendidikan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.28 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	6.117 satuan pendidikan		
03.04.03.04 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	01 - Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	1	363.573 orang	15.948.765,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.04 KP: Penjaminan Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya mutu pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)	1	81,19 %	1.059.130,0	
		02 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)	1	76,01 %		
		03 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)	1	74,53 %		
		04 - Perguruan Tinggi terakreditasi A (PT)	1	160 PT		
		05 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PAUD)	1	67,01 %		
		06 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PNF)	1	58,00 %		
03.04.04.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi	01 - Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	1	66.914 satuan pendidikan	90.803,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.29 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.04.04.02 PRO-P: Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya perluasan budaya mutu pendidikan	01 - Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	1	8 dokumen	968.326,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.05 KP: Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	01 - Meningkatnya tata kelola pendidikan	01 - Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	1	100 %	109.596,6	
03.04.05.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan	01 - Jumlah provinsi memenuhi SPM pendidikan	1	34 provinsi	33.200,0	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
03.04.05.02 PRO-P: Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Menguatnya strategi pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	01 - Jumlah lembaga pendidikan yang mendapatkan Pembinaan Berbasis Sekolah (MBS)	1	1.610 lembaga	48.991,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.05.03 PRO-P: Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	01 - Meningkatnya sinkronisasi data pokok pendidikan	01 - Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru, dan berkelanjutan	1	95,4 %	5.524,5	KEMENTERIAN AGAMA
03.04.05.04 PRO-P: Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	01 - Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan PAUD-HI	01 - Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan layanan PAUD Holistik Integratif	1	100 kab/kota	21.880,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.05 PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	01 - Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha	01 - Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	1	9,44 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.30 -

PN/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	1	menurun		
		03 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	75,57-76,73		
		04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	53,76 %		
		05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	1	menurun		
		06 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat dalam tiga bulan terakhir	1	meningkat	92.161,5	
		07 - Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	1	meningkat		
		08 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	1	0,55 %		
03.05.01 KP: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	01 - Terpenuhinya hak dan perlindungan anak	01 - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1	77,77	34.470,3	
		02 - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1	67,6		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.31 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.05.01.01 PRO-P: Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	01 - Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	01 - Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	1	3,55 %	12.410,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah provinsi/kab/kota yang memperoleh peringkat KLA	1	290 provinsi/kab/kota		
03.05.01.02 PRO-P: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	01 - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	1	5,02 %	22.060,3	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
		02 - Persentase anak korban kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif	1	70 %		
03.05.02 KP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	01 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	53,76 %	31.180,9	
03.05.02.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan PUG	01 - Indeks PUG Nasional	1	71,03	12.435,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
03.05.02.02 PRO-P: Perlindungan Perempuan, termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	01 - Terwujudnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	01 - Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	1	85 %	18.745,9	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.32 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.05.03 KP: Kualitas Pemuda	01 - Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir	1	81,97 %	26.510,3	
03.05.03.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan	01 - Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	1	50 %	2.964,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	1	50 %		
03.05.03.02 PRO-P: Pencegahan Perilaku Berisiko	01 - Terlindunginya pemuda dari perilaku berisiko	01 - Angka kesakitan pemuda	1	7,24	1.500,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.05.03.03 PRO-P: Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda	01 - Meningkatnya partisipasi sosial dan politik pemuda	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	1	meningkat	22.045,5	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.06 PP: Pengentasan Kemiskinan	01 - Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	1	40,00 %	659.030,6	
		02 - Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah	1	419.935 rumah tangga		
03.06.01 KP: Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	01 - Terakselerasinya penguatan ekonomi keluarga miskin	01 - Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	0,11 %	23.955,7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.33 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.06.01.01 PRO-P: Fasilitasi Modal Usaha	01 - Terfasilitasinya modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	3.328.071 KK	23.955,7	KEMENTERIAN KEUANGAN
03.06.02 KP: Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	01 - Terlaksananya pengembangan keperantaraan usaha dan pemberdayaan sosial	01 - Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha (lembaga)	1	3.900 lembaga	46.706,7	
		02 - Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	1	2.000 orang		
03.06.02.01 PRO-P: Fasilitasi Keperantaraan Usaha Produktif	01 - Meningkatnya lembaga yang memperoleh fasilitasi keperantaraan usaha	01 - Jumlah BUMDes yang dikembangkan	1	500 badan usaha	33.775,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.06.02.02 PRO-P: Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial	01 - Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial	01 - Jumlah kelompok yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial dari dunia usaha (kelompok)	1	200 kelompok	5.645,3	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.06.02.03 PRO-P: Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01 - Terlaksananya penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah KTH mandiri (kelompok)	1	300 kelompok	7.286,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya) (kelompok)	1	210 kelompok masyarakat		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.34 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang andal (perhutanan sosial, RHL, KPH, gambut, dan kemitraan konservasi) (orang)	1	6.500 orang		
03.06.03 KP: Reforma Agraria	01 - Terlaksananya reforma agraria	01 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	5	0,0025	465.627,6	
		02 - Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima reforma agraria	5	15 %		
03.06.03.01 PRO-P: Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	01 - Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	01 - Luas sumber TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) (ha)	5	626.400 ha	71.497,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
03.06.03.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi atas Tora	01 - Terlaksananya legalisasi atas TORA dan meningkatnya kualitas data pertanahan	01 - Jumlah bidang tanah yang didistribusi dan dilegalisasi (bidang)	5	419.935 bidang	178.189,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
03.06.03.03 PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA	01 - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	01 - Jumlah masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan dalam kerangka reforma agraria (KK)	5	129.600 kepala keluarga	215.940,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
03.06.04 KP: Perhutanan Sosial	01 - Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	01 - Luas distribusi akses kelola dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat (ha)	1	1.684.968,12 ha	122.740,7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.35 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.06.04.01 PRO-P: Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	01 - Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat	01 - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (ha)	1	1.684.968,12 ha	122.740,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
03.07 PP: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi	1	2,4 juta orang	15.345.726,2	
		02 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	1	24,11 %		
		03 - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1	59,71 %		
		04 - Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	5	219 prototipe		
		05 - Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	5	400 produk		
		06 - Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	5	150 inovasi		
		07 - Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik	5	2.500 paten		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.36 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahana Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	5	900 paten		
		09 - Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	1	14,96 %		
		10 - Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	1	126 PUI		
		11 - Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	1	65 lembaga		
		12 - Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	2	11 infrastruktur		
		13 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi	5	5 unit		
		14 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi	2	3 unit		
		15 - Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	5	1 produk		
		16 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam	5	15 teknologi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.37 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah-an Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		17 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	5	35 teknologi		
		18 - Peringkat pada Asian Games	1	12 besar		
		19 - Peringkat pada Asian Para Games	1	8 besar		
03.07.01 KP: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	01 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	01 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	1	1.890.345 orang	12.405.891,8	
		02 - PT Vokasi berakreditasi A	1	12 PT Vokasi		
		03 - Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi	1	1.700.000 orang		
		04 - Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi	1	317.172 orang		
		05 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi	1	2,4 juta orang		
		06 - Jumlah pemagangan dalam negeri	1	55.000 orang		
		07 - Jumlah pemagangan luar negeri	1	3.000 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.38 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.01.01 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Meningkatnya peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah kesepakatan kerja sama antara industri/swasta dengan satuan pendidikan vokasi	1	200 kesepakatan	2.372.779,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.07.01.02 PRO-P: Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	1	1.101 SMK	9.580.373,6	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)
03.07.01.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	01 - Meningkatnya kualitas pendidik vokasi	01 - Jumlah SDM SMK, PT Vokasi, dan kursus/pelatihan yang mendapatkan pelatihan bidang pendidikan	1	8.453 orang	185.266,4	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.39 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.01.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Menguatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	1	680 lembaga	34.167,5	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.07.01.05 PRO-P: Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	01 - Menguatnya sistem sertifikasi kompetensi	01 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	1	1.890.345 orang	233.305,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.07.02 KP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	01 - Menguatnya pendidikan tinggi berkualitas	01 - Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	1	24.536 artikel	703,8	
		02 - Jumlah sitasi di jurnal internasional	1	51.291 sitasi		
03.07.02.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lulusan PT	01 - Meningkatnya kualitas lulusan PT	01 - Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	1	242.000 orang	703,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.40 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.03 KP: Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	01 - Meningkatnya kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi	01 - Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	5	900 paten	1.695.430,9	
03.07.03.01 PRO-P: Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di Bidang-Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	01 - Terlaksananya pemanfaatan iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	01 - Jumlah hasil inovasi <i>Flagship PRN</i>	1	2 produk	298.489,9	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN), BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
03.07.03.02 PRO-P: Pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Terlaksananya pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Jumlah SDM iptek yang ditingkatkan kualifikasinya	1	850 orang	878.249,3	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
03.07.03.03 PRO-P: Penciptaan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penciptaan ekosistem inovasi	01 - Jumlah STP yang ditingkatkan kualitasnya	1	4 lembaga	518.691,7	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
03.07.04 KP: Prestasi Olahraga	01 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional	01 - Jumlah perolehan medali emas Asian Games	1	8 medali emas	1.243.699,8	
		02 - Jumlah perolehan medali emas Asian Para Games	1	20 medali emas		
03.07.04.01 PRO-P: Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan	01 - Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	01 - Kebijakan yang disusun dan dimanfaatkan dalam rangka penguatan <i>Sport Big Data</i> dan <i>Sport Science</i>	1	1 NSPK	2.191,3	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Kebijakan yang disusun dan dimanfaatkan terkait sinergi olahraga pendidikan dan olahraga prestasi serta standardisasi sekolah khusus keolahragaan dan sentra keolahragaan usia muda	1	1 NSPK		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.41 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Kebijakan yang disusun dan dimanfaatkan dalam rangka pembangunan pusat pelatihan atlet Olimpiade dan pelatihan nasional di daerah berbasis cabang olahraga Olimpiade	1	1 NSPK		
03.07.04.02 PRO-P: Pengembangan Budaya Olahraga	01 - Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat	01 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	1	36,39 %	52.827,5	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.07.04.03 PRO-P: Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan Potensi Daerah	01 - Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade, Paralimpiade, dan potensi daerah	01 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLP	1	10 %	1.138.716,9	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO)	1	10 %		
		03 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLM	1	5 %		
		04 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahragawan Paralimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia (SKODI)	1	20 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.42 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Persentase sekolah khusus/keberbakatan olahraga yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	1	25 %		
		06 - Persentase PPLP yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	1	10 %		
		07 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Olimpik pada olahragawan andalan nasional	1	30 %		
		08 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Paralimpik pada olahragawan andalan nasional	1	15 %		
		09 - Jumlah pusat pelatihan nasional yang terbentuk di daerah sesuai Desain Besar Olahraga	1	10 provinsi		
03.07.04.04 PRO-P: Penataan Kelembagaan Olahraga	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan olahraga	01 - Organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan	1	22 lembaga	14.351,2	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.07.04.05 PRO-P: Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional	01 - Tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat	1	450 orang	12.819,5	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.43 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.04.06 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional	01 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional	01 - Jumlah fasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi, dan/atau direnovasi	1	4 lembaga	22.460,4	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik	1	4 lembaga		
03.07.04.07 PRO-P: Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan	01 - Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	01 - Kajian yang disusun dalam rangka pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	1	1 dokumen	333,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya dimunculkan pada salah satu ProP;
- 2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, dan KPBU, namun belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- 3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2022.
- 4) Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
 1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan Infrastruktur
 3. Penyederhanaan Regulasi
 4. Penyederhanaan Birokrasi
 5. Transformasi Ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.1 -

PRIORITAS NASIONAL 4 : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04 PN: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	01 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	01 - Indeks Capaian Revolusi Mental		71,96	5.703.452	
	02 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan		59,71		
	03 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat		0,64		
	04 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama		74,70		
	05 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	01 - Indeks Pembangunan Keluarga		57,00		
		02 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan		22,00 tahun		
	06 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Nilai Budaya Literasi		65,70		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.01 PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	01 - Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	1	79,22	522.175	
		02 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	1	71,96		
		03 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	1	77,64		
		04 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	1	59,93		
		05 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	1	71,06		
	02 - Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter	01 - Indeks Kerentanan Keluarga	1	11,00		
		02 - Indeks Karakter Remaja	1	68,92		
04.01.01 KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	01 - Menguatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	01 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	1	35 %	105.049	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.IV.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.01.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan (<i>Bullying Free School Environment</i>)	01 - Berkembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	01 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan	1	30 %	44.580	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.01.01.02 PRO-P: Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan	01 - Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	01 - Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	1	64 %	13.866	KEMENTERIAN AGAMA
04.01.01.03 PRO-P: Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan	01 - Meningkatnya kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan berkembangnya pendidikan kepramukaan	01 - Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dan kepramukaan	1	3.232 orang	46.603	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.01.02 KP: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	01 - Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	01 - Skor Rata-Rata Nilai SKM Secara Nasional	4	76,61	2.200	
04.01.02.01 PRO-P: Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya	01 - Terlaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	01 - Jumlah instansi dengan nilai SKM "Baik"	4	150 instansi	1.000	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
04.01.02.02 PRO-P: Penerapan Disiplin, <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> dalam Birokrasi	01 - Terlaksananya penerapan disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam birokrasi	01 - Jumlah laporan tindak lanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS	4	25 laporan	1.200	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.4 -

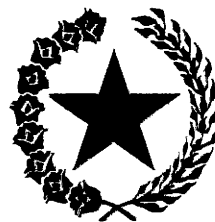
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.03 KP: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	01 - Menguatnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	01 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	1	76,72	167.033	
		02 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	1	34		
04.01.03.01 PRO-P: Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kecakapan Hidup	01 - Terlaksananya kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	01 - Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	33,46 %	127.264	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN AGAMA
04.01.03.02 PRO-P: Peningkatan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Siklus Hidup dengan Memperhatikan Kesenambungan Antargenerasi, Sebagai Upaya Penguatan Fungsi dan Nilai Keluarga	01 - Terlaksananya peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	01 - Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB	1	50,50 %	34.915	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
04.01.03.03 PRO-P: Pewujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha	01 - Terwujudnya lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha	01 - Persentase daerah yang Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakatnya (IPPM) (berkategori) Baik	1	8 %	4.854	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
04.01.04 KP: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	01 - Terwujudnya penguatan pusat-pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	01 - Jumlah pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	92 lembaga	32.620	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.04.01 PRO-P: Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Terwujudnya penguatan Gugus Tugas GNRM dalam rangka pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	67 lembaga	19.532	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
04.01.04.02 PRO-P: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	01 - Jumlah pusat perubahan di tingkat daerah yang memperoleh penguatan	1	25 lembaga	13.088	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
04.01.05 KP: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	01 - Meningkatnya kualitas koperasi dan kewirausahaan	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	200 unit (kumulatif)	45.085	.
		02 - Jumlah wirusaha baru industri kecil yang tumbuh	5	12.000 WUB		
04.01.05.01 PRO-P: Membangun Budaya Ekonomi Nasional dengan Platform Koperasi dalam Kegiatan Usaha Produktif	01 - Terlaksana pembinaan kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang menerima pembinaan	5	250 koperasi	9.837	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
04.01.05.02 PRO-P: Peningkatan Etos Kerja dan Kewirausahaan Berlandaskan Semangat Gotong Royong	01 - Terlaksananya pempasyarakatan kewirausahaan	01 - Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kewirausahaan	5	4.500 orang	6.719	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.IV.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.05.03 PRO-P: Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	01 - Terlaksananya edukasi cinta produk dalam negeri	01 - Jumlah konsumen yang didedukasi cinta produk dalam negeri	5	8.000 orang	28.529	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
04.01.06 KP: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	01 - Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara	01 - Persentase capaian proyek prioritas pada kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	1	100 %	170.189	
04.01.06.01 PRO-P: Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	01 - Menguatnya pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	1	100 %	50.716	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
04.01.06.02 PRO-P: Peningkatkan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas peningkatan peran dan fungsi BPIP	1	100 %	110.436	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.01.06.03 PRO-P: Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila	01 - Terwujudnya harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	01 - Jumlah rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	1	3 dokumen	5.609	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.06.04 PRO-P: Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara	01 - Terwujudnya pembersihan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	01 - Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN, ormas, organisasi asing, serta media yang terindikasi menentang ideologi negara	1	3 dokumen	3.427	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.02 PP: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	01 - Nilai Dimensi Warisan Budaya	1	52,11	585.595	
		02 - Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	1	38,19		
		03 - Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	1	43,52		
04.02.01 KP: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	01 - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	1	30 %	129.394	
04.02.01.01 PRO-P: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	01 - Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	1	32 %	50.915	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.01.02 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	1	60 %	54.925	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.01.03 PRO-P: Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, dan Memori Kolektif Bangsa	01 - Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa	01 - Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	1	10,07 %	23.554	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
04.02.02 KP: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	1	0,31 %	362.392	
		02 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	1	36 %		
04.02.02.01 PRO-P: Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film	01 - Terwujudnya pengembangan produk seni, budaya, dan film	01 - Jumlah produksi film, musik dan media baru	1	40 produksi	243.439	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.02.02 PRO-P: Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional	01 - Terwujudnya penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	01 - Jumlah festival skala internasional (<i>Mega Events</i>) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	1	9 festival	13.000	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.02.03 PRO-P: Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	1	50 %	104.153	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim	01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	01 - Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	1	3 komunitas	1.800	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
04.02.03 KP: Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim Terwujudnya pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	01 - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	1	22,58 %	26.700	
04.02.03.01 PRO-P: Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup	01 - Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	01 - Wilayah adat yang dikembangkan menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	1	7 wilayah adat	15.500	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
04.02.03.02 PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya	01 - Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	01 - Jumlah penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat	1	35 lembaga	10.200	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.03.03 PRO-P: Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta	01 - Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	01 - Jumlah layanan informasi potensi ekonomi KIK di seluruh Indonesia	1	33 layanan	1.000	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.04 KP: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	01 - Jumlah pengunjung internasional <i>Mega Events</i> Kebudayaan	1	90.000 orang	28.249	
04.02.04.01 PRO-P: Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara	01 - Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	01 - Jumlah pembelajar BIPA	1	85.865 orang	28.249	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.04.02 PRO-P: Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri	01 - Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam Forum Internasional Bidang Kebudayaan	01 - Jumlah pengunjung internasional <i>Mega Events</i> Kebudayaan	1	90.000 orang	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05 KP: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	01 - Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	1	60 %	38.860	
04.02.05.01 PRO-P: Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan	01 - Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum	1	100 cagar budaya	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kebudayaan	01 - Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	1	5.500 orang	31.661	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.05.03 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	01 - Jumlah fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	1	150 kelompok masyarakat	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.04 PRO-P: Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	01 - Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	01 - Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan	1	1 layanan	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.05 PRO-P: Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	01 - Jumlah layanan umum, kerja sama dan kehumasan bidang kebudayaan	1	1 layanan	7.198	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.03 PP: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	01 - Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	01 - Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	1	85,97	3.295.551	
		02 - Indeks Kepuasan Layanan KUA	1	82,00		
		03 - Nilai Dimensi Toleransi	1	72,29		
		04 - Nilai Dimensi Kesetaraan	1	76,23		
		05 - Nilai Dimensi Kerja Sama	1	75,86		
04.03.01 KP: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	01 - Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	01 - Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama (persen)	1	89,58 %	1.195.425	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	01 - Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	01 - Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1	1:5	786.350	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.02 PRO-P: Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru	01 - Menguatnya penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	01 - Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama (persen)	1	58,50 %	294.695	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.03 PRO-P: Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan	01 - Menguatnya penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	01 - Persentase pesantren yang berwawasan moderasi beragama (persen)	1	4,00 %	2.000	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.04 PRO-P: Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran	01 - Terwujudnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	01 - Persentase rumah ibadah yang ramah (persen)	1	55 %	105.381	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.05 PRO-P: Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa	01 - Terlaksananya pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku	01 - Jumlah aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama (orang)	1	5.886 orang	7.000	KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.13 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.02 KP: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	01 - Terwujudnya Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	01 - Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (persen)	1	88 %	343.652	
04.03.02.01 PRO-P: Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama	01 - Terwujudnya pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	01 - Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti (persen)	1	100 %	30.258	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
04.03.02.02 PRO-P: Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	01 - Terwujudnya penguatan • peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	01 - Persentase lembaga agama dan lembaga keagamaan yang difasilitasi (persen)	1	15 %	257.194	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.02.03 PRO-P: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong	01 - Terwujudnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	01 - Persentase sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP (persen)	1	100 %	56.199	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA
04.03.03 KP: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	01 - Terwujudnya Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	01 - Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan (persen)	1	75,83 %	81.679	
04.03.03.01 PRO-P: Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	01 - Terwujudnya penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	01 - Budaya keagamaan yang dibina dan dikembangkan (kegiatan)	1	19 kegiatan	13.811	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.03.03.02 PRO-P: Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	01 - Terwujudnya pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	01 - Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses (persen)	1	28,3 %	16.591	KEMENTERIAN AGAMA, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.03.03 PRO-P: Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	01 - Terwujudnya pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	01 - Jumlah <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi (kegiatan)	1	1.907 kegiatan	51.277	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04 KP: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	01 - Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	01 - Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (persen)	1	55 %	1.605.470	
04.03.04.01 PRO-P: Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	01 - Terwujudnya fasilitasi pelayanan keagamaan	01 - Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi (unit)	1	865.227 unit	756.566	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.02 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	01 - Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hittaya sukhaya (keluarga)	1	361.316 keluarga	25.616	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.03 PRO-P: Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Persentase produk yang tersertifikasi halal (persen)	1	63 %	72.926	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
04.03.04.04 PRO-P: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar (persen)	1	85,24 %	750.361	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Petugas Haji Profesional (persen)	1	87,80 %		
04.03.05 KP: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	01 - Terwujudnya Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	01 - Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan (persen)	1	53 %	69.324	
04.03.05.01 PRO-P: Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	01 - Terwujudnya pemberdayaan dana sosial keagamaan	01 - Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (persen)	1	29,01 %	30.198	KEMENTERIAN AGAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.05.02 PRO-P: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Terwujudnya Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan (persen)	1	55 %	39.126	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.05.03 PRO-P: Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel	01 - Terwujudnya Pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji (persen)	1	94 %	-	KEMENTERIAN AGAMA
04.04 PP: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	01 - Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	13,00	1.300.132	
04.04.01 KP: Peningkatan Budaya Literasi	01 - Terwujudnya Peningkatan Budaya Literasi	01 - Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1	1:14	903.017	
		02 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	1:18.000		
		03 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	1	21,24 %		
04.04.01.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Terwujudnya pengembangan budaya kegemaran membaca	01 - Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	1	20.161 orang	81.372	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Sistem Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi	01 - Terwujudnya pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi	01 - Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi	1	330 orang	133.999	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah Lembaga Perbukuan yang terakreditasi	1	20 lembaga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.04.01.03 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	01 - Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial	1	863 perpustakaan	687.646	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN SOSIAL, PEMDA (DAK FISIK)
04.04.02 KP: Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	01 - Terwujudnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	01 - Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji	1	46 %	25.689	
		02 - Indeks daya hidup bahasa daerah	1	0,57		
04.04.02.01 PRO-P: Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional	01 - Terwujudnya peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	01 - Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	1	32 negara	-	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.02.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Sastra di Satuan Pendidikan dan Komunitas	01 - Terwujudnya pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas	01 - Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1	165.014 kosakata	16.329	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia	1	6.423 orang		
04.04.02.03 PRO-P: Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa	01 - Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	01 - Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah	1	66.000 orang	9.361	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.03 KP: Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	01 - Terwujudnya pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	01 - Jumlah talenta nasional bidang riset dan inovasi	1	11.500 orang	329.000	
04.04.03.01 PRO-P: Peningkatan Budaya Riset dan Ekperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini	01 - Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	01 - Jumlah talenta nasional bidang riset dan inovasi	1	11.500 orang	140.000	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
04.04.03.02 PRO-P: Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi	01 - Terfasilitasinya hasil riset dan inovasi	01 - Jumlah mitra terfasilitasi	1	3.000 mitra	189.000	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
04.04.04 KP: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	01 - Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	01 - Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	4,00 %	42.426	
04.04.04.01 PRO-P: Pengembangan Mitra Perpustakaan (<i>Library Supporter</i>)	01 - Terwujudnya pengembangan mitra perpustakaan (<i>library supporter</i>)	01 - Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	500 perpustakaan	17.426	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
04.04.04.02 PRO-P: Pengembangan Inovasi Sosial yang Didukung dari Pendanaan Filantropi	01 - Terwujudnya pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi	01 - Jumlah Pojok Baca Digital di Daerah	1	100 lokasi	25.000	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya dimunculkan pada salah satu ProP;
- 2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, dan KPBU, namun belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- 3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2022.
- 4) Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
 1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan Infrastruktur
 3. Penyederhanaan Regulasi
 4. Penyederhanaan Birokrasi
 5. Transformasi Ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.1 -

PRIORITAS NASIONAL 5 : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05 PN: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	01 - Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau		65,10 %	129.854.210,3	
		02 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010		60 %		
		03 - Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif)		5,00 %		
		04 - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)		35,0 %		
	02 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	01 - Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau		2,09 jam/100 km		
		02 - Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>)		26 %		
		03 - Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2		87 %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.V.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara		88 %		
	03 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan		6 kota (berlanjut)		
		02 - Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan		68,2 %		
	04 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	01 - Rasio elektrifikasi		~ 100 %		
		02 - Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik		1.268 kWh/kapita		
		03 - Penurunan emisi GRK sektor energi		91 juta ton		
	05 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	01 - Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pital lebar (4G)		98,50 %		
05.01 PP: Infrastruktur Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	01 - Rasio <i>outstanding</i> KPR terhadap PDB	2	3,30 %	37.961.840,6	
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	2	94,00 %		
		03 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	2	84,08 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase rumah tangga yang memiliki sertipikat hak atas tanah untuk perumahan	2	63,20 %		
	02 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	2	95,10 %		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	2	13,45 %		
		03 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	2	25,57 %		
		04 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	2	69,53 %		
		05 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	2	82,07% akses layak (termasuk 11,50% akses aman)		
		06 - Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2	2,98 %		
		07 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	2	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan		
		08 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	83,60 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.4 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	2	180 kab/kota		
	04 - Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	2	26 menit		
	05 - Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi	01 - Volume tampungan air per kapita	2	53,90 m ³ /kapita		
		02 - Persentase luas sawah beririgasi	2	54,1 %		
		03 - Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi	2	308.704 ha		
05.01.01 KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	01 - Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	01 - Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun melalui peran pemerintah	2	3.824 unit	5.507.124,0	
		02 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERA	2	119.000 rumah tangga		
		03 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	200.000 rumah tangga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah	2	87.500 unit		
		05 - Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	1085 ha		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	2	48 kab/kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	2	48 kab/kota		
05.01.01.01 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitas penyediaan hunian baru	01 - Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitas pemerintah	2	3.824 unit	2.304.061,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
05.01.01.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitas pembiayaan perumahan	01 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	200.000 rumah tangga	11.250,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan	2	119.000 rumah tangga		
05.01.01.03 PRO-P: Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	01 - Terlaksananya pengembangan fasilitas peningkatan kualitas rumah	01 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas	2	87.500 rumah tangga	1.807.175,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.01.01.04 PRO-P: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Terlaksananya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman	01 - Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan termasuk PSU kawasan skala besar	2	20.500 unit	159.550,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.01.05 PRO-P: Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	01 - Terlaksananya fasilitas peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim (IMB dan SLF)	01 - Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	48 kab/kota	53.980,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
05.01.01.06 PRO-P: Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh	01 - Terlaksananya fasilitas penanganan permukiman kumuh	01 - Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	1085 ha	1.171.107,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)
05.01.02 KP: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	2	17.288.765 sambungan rumah	10.696.360,9	
		02 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	2	47.011.647 rumah tangga		
		03 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	2	9.094.012 rumah tangga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	83,6 %		
		05 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	2	62.352 sambungan rumah		
		06 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	2	284.145 sambungan rumah		
		07 - Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	2	1.730.314 rumah tangga		
		08 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar <i>sanitary landfill</i> (RT)	2	4.470.423 rumah tangga		
		09 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	2	316.629 rumah tangga		
		10 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	2	308.845 rumah tangga		
		11 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	2	87 kab/kota		
		12 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	2	83 kab/kota		
		13 - Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2	2,98 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.02.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengembangan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah pengembangan kapasitas SPAM regional	2	2.030 liter/detik	10.201.098,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), PEMDA (DAK FISIK), (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
		02 - Jumlah pembangunan dan peningkatan kapasitas SPAM	2	1.905 liter/detik		
		03 - Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	2	592.000 sambungan rumah		
		04 - Persentase <i>Non-Revenue Water</i> (NRW) PDAM	2	28 %		
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional (kab/kota)	2	28 kab/kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (kab/kota)	2	168 kab/kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota)	2	74 kab/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	2	74 kab/kota		
		09 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	2	113 kab/kota		
		10 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	2	25 kab/kota		
05.01.02.02 PRO-P: Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Persentase PDAM yang memiliki <i>business plan</i> menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024	2	45 %	486.467,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase PDAM dengan tarif <i>Full Cost Recovery</i>	2	75 %		
		03 - Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll)	2	60 %		
		04 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota	2	33 provinsi		
		05 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik	2	33 provinsi		
		06 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	2	70 %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.V.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.02.03 PRO-P: Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi	2	34 provinsi	500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun	2	4 NSPK		
		03 - Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun	2	4 NSPK		
		04 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Jakstrada air minum	2	102 kab/kota		
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki RISPAM	2	102 kab/kota		
05.01.02.04 PRO-P: Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	01 - Terlaksananya pengawasan kualitas air minum dan sanitasi	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	2	102 kab/kota	8.295,3	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum	2	514 kab/kota		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki <i>effluent</i> IPAL, IPLT, dan <i>leachate</i> TPA yang memenuhi syarat	2	40 kab/kota		
05.01.03 KP: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	01 - Terkelolanya air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	39.82 m ³ /detik	678.196,2	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	2	65 %		
05.01.03.01 PRO-P: Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan debit air baku	2	2,86 m ³ /detik	675.206,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.01.03.02 PRO-P: Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA	01 - Terlaksananya penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	01 - Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbaharui	2	21 rekomendasi kebijakan	2.989,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
05.01.04 KP: Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01 - Terlaksananya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	01 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran laut per 10.000 pelayaran	1	1,09	2.150.852,8	
		02 - Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2	2,15		
		03 - Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	2	0,25		
		04 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran darat per 10.000 pelayaran	2	0,09		
05.01.04.01 PRO-P: Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	01 - Terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Jumlah peralatan SAR yang disediakan	2	85 unit	1.940.525,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.V.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun	2	33 provinsi		
		03 - Jumlah pengadaan dan pemasangan ATCS dan ITS	2	10 unit		
		04 - Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	2	1 unit		
		05 - Jumlah kapal negara KPLP yang dibangun	2	21 unit		
		06 - Jumlah prasarana kenavigasian	2	1 Lokasi		
05.01.04.02 PRO-P: Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan	01 - Terlaksananya pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian, dan pertolongan	01 - Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten	1	5.000 orang	210.326,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL
		02 - Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan <i>Safety and Security</i> SDM Transportasi	1	79.929 orang		
	02 - Jumlah pelaksanaan promosi keselamatan jalan nasional	01 - Promosi keselamatan jalan nasional	1	26 promosi		
05.01.05 KP: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	01 - Terwujudnya ketahanan kebencanaan infrastruktur	01 - Persentase penambahan jumlah korban bencana banjir	2	0 %	6.212.578,1	
		02 - Persentase penambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut	2	0 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.13 -

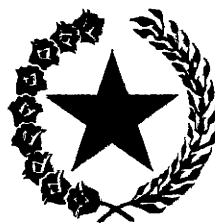
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase pertambahan jumlah korban bencana lahar gunung api	2	0 %		
05.01.05.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana	01 - Terlaksananya pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	8 wilayah sungai	1.200,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah provinsi yang memiliki peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana tsunami	2	3 provinsi		
05.01.05.02 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir	2	20 wilayah sungai	4.556.448,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Memiliki proyek berstatus PSN)
		02 - Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen	2	2 provinsi		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir	2	21 kawasan pesisir		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.05.03 PRO-P: Penyediaan Sistem Terpadu Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah	2	3 kab/kota	1.636,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah	2	15 CAT		
		03 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir	2	4 wilayah sungai		
		04 - Jumlah lokasi dengan pengembangan sistem peringatan dini bencana longsor	2	6 lokasi		
		05 - Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	2	84 kegiatan		
05.01.05.04 PRO-P: Restorasi dan Konservasi Infrastruktur Alami	01 - Terlaksananya restorasi dan konservasi infrastruktur alami	01 - Jumlah danau/situ yang direstorasi dan dikonservasi	2	5 unit	1.653.292,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
05.01.06 KP: Waduk <i>Multipurpose</i> dan Modernisasi Irigasi	01 - Terbangunnya waduk <i>multipurpose</i> dan modernisasi irigasi	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	2	19,49 miliar m ³	12.716.728,6	
		02 - Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	2	19 unit		
		03 - Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	2	10 unit		
		04 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	2	9 daerah irigasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	30.447 ha		
05.01.06.01 PRO-P: Perencanaan Pengembangan Bendungan Multiguna dan Pemanfaatan Tampungan Alami	01 - Terlaksananya perencanaan pembangunan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	01 - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	2	14 dokumen	19.572,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.06.02 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun	2	10 unit	8.928.765,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.01.06.03 PRO-P: Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya	2	19 unit	706.560,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Memiliki proyek berstatus PSN)
		02 - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	2	7,77 MW		
05.01.06.05 PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	30.447 ha	3.058.526,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK) (Memiliki proyek berstatus PSN)
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	110.672 ha		
05.01.06.06 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Alokasi Air dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi	01 - Terlaksananya peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	01 - Jumlah dokumen peningkatan pengelolaan alokasi air	2	46 dokumen	3.303,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah kelembagaan irigasi yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	2	25 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.02 PP: Infrastruktur Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas wilayah	01 - Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota	2	94/72/60 %	63.985.400,0	
		02 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	2	327,7 km		
		03 - Panjang jalan baru yang terbangun	2	347 km		
		04 - Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	2	6.487 km		
		05 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	2	3 lokasi (berlanjut)		
		06 - Jumlah rute subsidi tol laut	2	35 rute		
		07 - Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	2	14 pelabuhan (6 selesai, 8 berlanjut)		
		08 - Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)	2	10 lokasi (berlanjut)		
		09 - Jumlah rute jembatan udara	2	42 rute		
05.02.01 KP: Konektivitas Jalan	01 - Terwujudnya konektivitas jalan	01 - Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan	2	7 lokasi	49.357.598,2	
		02 - Panjang jalan prioritas nasional yang dibangun	2	370.84 km		
		03 - Panjang jembatan prioritas nasional yang dibangun	2	14.890 m		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.01.01 PRO-P: Pembangunan Jalan Strategis	01 - Terlaksananya pembangunan jalan strategis	01 - Panjang jalan lintas utama pulau ditangani	2	4378 km	13.355.597,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
		02 - Panjang jembatan lintas utama pulau ditangani	2	141738,94 m		
05.02.01.02 PRO-P: Pembangunan Jalan Tol	01 - Terlaksananya pembangunan jalan tol	01 - Panjang jalan tol yang ditangani	2	9,5 km	27.744.932,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (1 K/L atau lebih dari 1 K/L memiliki proyek berstatus PSN)
05.02.01.03 PRO-P: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, <i>Food Estate</i> dan KSPN)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, <i>Food Estate</i> , dan KSPN)	01 - Panjang jalan dan jembatan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN) yang ditangani	2	237 km	3.008.489,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK) (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.02.01.04 PRO-P: Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, dan Terminal)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal) yang dibangun	01 - Panjang jalan dan jembatan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	2	1288 km	2.589.283,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02.01.05 PRO-P: Preservasi Jalan Nasional (termasuk Peningkatan/Pelebaran)	01 - Terlaksananya preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	01 - Panjang jalan nasional yang di preservasi (termasuk peningkatan/pelebaran)	2	15094.06 km	2.136.918,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02.01.06 PRO-P: Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Daerah	01 - Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	01 - Jumlah lokasi jalan daerah yang dibangun dan ditingkatkan	2	19 lokasi	522.376,3	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.18 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.02 KP: Konektivitas Kereta Api	01 - Terwujudnya konektivitas kereta api	01 - Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	2	132 km (berlanjut)	3.298.882,7	
		02 - Panjang jalur kereta api yang ditingkatkan	2	238 km (berlanjut)		
05.02.02.01 PRO-P: Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota	01 - Terlaksananya pembangunan jalur kereta api antarkota	01 - Jumlah kegiatan pembangunan prasarana kereta api	2	9 lokasi	2.019.331,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU) (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.02.02.02 PRO-P: Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan, dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	01 - Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	01 - Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	2	5 lokasi	987.391,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Memiliki proyek berstatus PSN)
		02 - Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana Kereta Api (IMO)	2	1 paket		
05.02.02.04 PRO-P: Penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Terlaksananya penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Jumlah layanan subsidi perkeretaapian yang tersedia	2	10 layanan	292.159,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Memiliki proyek berstatus PSN)
		02 - Tersedianya dana PSO perkeretaapian	2	1 paket (APBN non-Kemenhub)		
05.02.03 KP: Konektivitas Laut	01 - Terwujudnya konektivitas laut	01 - Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut	2	23 lokasi	5.763.926,6	
		02 - Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur	2	158 rute		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.V.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.03.01 PRO-P: Pengembangan Pelabuhan Utama (Hub)	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut utama	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	1 lokasi	3.198.214,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU) (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.02.03.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	16 lokasi	784.960,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU)
05.02.03.03 PRO-P: Pelabuhan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	01 - Pelabuhan mendukung kawasan strategis prioritas nasional	01 - Jumlah pelabuhan pendukung kawasan strategis prioritas nasional	2	6 lokasi	347.375,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.02.03.04 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Subsidi Tol Laut dan Perintis Angkutan Laut	01 - Terlaksananya Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	01 - Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur	2	35 rute	1.409.480,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah layanan angkutan laut perintis	2	117 rute		
		03 - Jumlah layanan angkutan ternak	2	6 rute		
05.02.03.05 PRO-P: Pengembangan Teknologi Informasi Pelayaran	01 - Terlaksananya pengembangan teknologi informasi pelayaran	01 - Jumlah teknologi informasi pelayaran yang dikembangkan	2	2 unit	23.896,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.04 KP: Konektivitas Udara	01 - Terwujudnya konektivitas udara	01 - Jumlah layanan angkutan udara kargo perintis	2	42 layanan	3.522.948,3	
		02 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan	2	42 lokasi		
		03 - Layanan subsidi angkutan udara	2	1 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.20 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.04.01 PRO-P: Jembatan Udara	01 - Terlaksananya pengembangan bandar udara pendukung jembatan udara	01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	2	5 lokasi	322.728,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.04.02 PRO-P: Pembangunan Bandara Baru	01 - Terlaksananya pembangunan bandara baru	01 - Jumlah bandara yang dibangun	2	9 lokasi	1.277.933,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.02.04.03 PRO-P: Pengembangan Bandara Hub Primer	01 - Terlaksananya pengembangan bandara hub primer	01 - Jumlah bandara hub primer yang direhabilitasi/dikembangkan	2	28 lokasi	1.456.663,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU) (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.02.04.05 PRO-P: Layanan Subsidi Angkutan Udara	01 - Terlaksananya layanan angkutan udara perintis	01 - Jumlah layanan angkutan udara perintis	2	229 layanan	465.622,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah layanan angkutan kargo perintis	2	7 layanan		
		03 - Angkutan BBM angkutan udara perintis dan kargo	2	9084 layanan		
05.02.05 KP: Konektivitas Darat	01 - Terwujudnya konektivitas darat	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau, dan sungai yang dibangun dan dikembangkan	2	35 lokasi	2.042.044,1	
		02 - Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal Tipe A yang dibangun	2	18 lokasi		
		03 - Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun	2	4 unit		
		04 - Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	2	315 layanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.21 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah layanan perintis angkutan jalan	2	330 layanan		
05.02.05.01 PRO-P: Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	01 - Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai pada jalur logistik yang dibangun	2	25 lokasi (berlanjut)	649.594,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.02.05.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau	01 - Terlaksananya pembangunan/pengembangan pelabuhan angkutan sungai danau	01 - Pelabuhan angkutan sungai danau yang dibangun/dikembangkan	2	10 lokasi (berlanjut)	141.923,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.05.03 PRO-P: Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang Antarnegara	01 - Terlaksananya pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	01 - Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	2	4 lokasi (berlanjut)	132.443,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.05.04 PRO-P: Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	01 - Terlaksananya pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	01 - Jumlah kapal penyeberangan perintis yang dibangun	2	4 unit (berlanjut)	95.724,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMDA (DAK FISIK)
05.02.05.05 PRO-P: Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang	01 - Terlaksananya penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang	01 - Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani	2	315 layanan	656.220,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani	2	330 layanan		
05.02.05.06 PRO-P: Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A	01 - Terlaksananya peningkatan/revitalisasi terminal penumpang Tipe A	01 - Jumlah terminal penumpang Tipe A yang ditingkatkan/direvitalisasi	2	14 lokasi	366.137,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.03 PP: Infrastruktur Perkotaan	01 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ <i>flyover/underpass</i> (kumulatif) (kota)	2	5 lokasi (berlanjut)	3.255.065,1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.22 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kumulatif) (kota)	2	5 kota (berlanjut)		
		03 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	5 kawasan		
05.03.01 KP: Transportasi Perkotaan	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal perkotaan	01 - Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun/dikembangkan (kota)	2	4 kota	3.102.275,7	
		02 - Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dibangun/dikembangkan (kota)	2	11 kota		
05.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	01 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis rel	2	4 kota	1.839.132,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Memiliki proyek berstatus PSN)
		02 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis jalan	2	6 kota		
		03 - Jumlah pengadaan dan pemasangan ATCS dan ITS	2	41 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.23 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.03.01.02 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Alih Moda yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Perekonomian, Permukiman, dan Fasilitas Umum pada Simpul-simpul Transportasi	01 - Terwujudnya pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman, dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi	01 - Jumlah kawasan alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi yang terbangun	2	2 lokasi	34.951,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	02 - Tersusunnya rekomendasi pembangunan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	01 - Rekomendasi pembangunan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	2	1 rekomendasi kebijakan		
05.03.01.03 PRO-P: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya	01 - Jumlah perkotaan lainnya yang dikembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel yang dibangun	2	1 kota	109.829,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.03.01.04 PRO-P: Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang antara Jalan dan KA di Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	01 - Jumlah perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun	2	4 lokasi	275.400,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.03.01.05 PRO-P: Pembangunan Jalan Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan jalan perkotaan	01 - Panjang jalan perkotaan yang ditangani (termasuk jalan lingkaran)	2	11,08 km	285.962,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah lokasi <i>flyover/underpass</i> di perkotaan yang dibangun	2	1 lokasi		
05.03.01.06 PRO-P: Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terselenggaranya penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	01 - Subsidi angkutan umum massal perkotaan	2	11 Layanan	557.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.03.02 KP: Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	01 - Terbangunnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	01 - Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga	2	21 % (kumulatif)	25.950,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.24 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.03.02.01 PRO-P: Pengembangan TIK Perkotaan	01 - Terlaksananya pengembangan TIK perkotaan	01 - Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar	2	14.000.000 rumah tangga (kumulatif)	25.950,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan <i>smart city</i>	5	100 kab/kota (kumulatif)		
05.03.03 KP: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	01 - Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan andal	2	7 kab/kota	-	
05.03.03.01 PRO-P: Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya penyediaan dan penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang andal dan terintegrasi	01 - Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP)	2	7 BUMD air minum	-	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah PDAM yang menerapkan <i>Smart Grid Water Management</i>	2	3 BUMD air minum		
05.03.04 KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan	2	5 kawasan	126.839,4	
05.03.04.01 PRO-P: Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Terlaksananya fasilitasi penanganan permukiman kumuh perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	5 kawasan	126.839,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.V.25 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.04 PP: Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	01 - Jumlah produksi tenaga listrik	2	382.696,10 GWh	2.448.117,6	
		02 - Penurunan emisi CO ₂ pembangkit	2	5,36 juta ton		
		03 - Jumlah pengguna listrik	2	81.217 ribu rumah tangga-kumulatif		
		04 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota (kumulatif)	2	983.998 sambungan rumah		
		05 - Jumlah kapasitas kilang minyak (kumulatif)	2	1.176.000 (Barrel per Calendar Day/BPCD)		
05.04.01 KP: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	01 - Susut jaringan	2	8,93 %	46.669,5	
		02 - Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit	2	16 %		
05.04.01.01 PRO-P: Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	01 - Kapasitas terpasang EBT tambahan	2	1933,3 MW	46.669,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah penambahan transmisi	2	4.632,10/7.510 kms/MVA		
		03 - Jumlah penambahan sistem distribusi	2	50.657/3.615 kms/MVA		
05.04.02 KP: Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Penambahan pelanggan baru	2	2.030 ribu pelanggan	2.351.500,6	
		02 - Jumlah penyediaan gas	2	194.869 Setara Barel Minyak (SBM)		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.V.26 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.04.02.01 PRO-P: Perluasan Jaringan Gas Kota	01 - Terlaksananya perluasan jaringan gas kota	01 - Pembangunan jaringan gas kota - APBN	2	40.000 Sambungan Rumah (SR)	400.000,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.04.02.02 PRO-P: Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan sistem distribusi	2	50.657/3.615 kms/MVA	1.951.500,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Memiliki proyek berstatus PSN)
		02 - Jumlah penambahan penyalur BBM satu harga	2	72 penyalur		
		03 - Tahapan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon - Semarang	2	1 tahap		
05.04.03 KP: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	01 - Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup	01 - Jumlah cadangan operasional BBM	2	23 hari	49.947,4	
		02 - <i>System Average Interruption Duration Index (SAIDI)</i>	2	5 jam/pelanggan/tahun		
	02 - Terlaksananya pembangunan pipa gas bumi	01 - Panjang ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi (kumulatif)	2	16.300 km		
05.04.03.01 PRO-P: Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur energi	01 - Jumlah rekomendasi keprospekan migas	2	4 rekomendasi kebijakan	49.410,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	02 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan kapasitas pembangkit	2	3.443 MW		
		02 - Jumlah penambahan transmisi	2	4.632,10/7.510 kms/MVA		
05.04.03.02 PRO-P: Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Terlaksananya pembangunan kilang minyak bumi	01 - Jumlah peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi (kumulatif)	2	1.176 ribu BOPD	537,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Memiliki proyek berstatus PSN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.27 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.05 PP: Transformasi Digital	01 - Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	01 - Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	1, 2, 5	9,80-10,0 %	22.203.787,0	
		02 - Persentase pengguna internet	2	79,20 %		
		03 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	2	73 %		
05.05.01 KP: Penuntasan Infrastruktur TIK	01 - Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	01 - Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i>	2	99 % (kumulatif)	18.510.220,8	
		02 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	2	42,85 % (kumulatif)		
		03 - Persentase rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan <i>up to 30 Mbps</i>)	5	9 %		
		04 - Persentase rasio harga layanan <i>mobile broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	5	0,35 %		
		05 - Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	2	93 %		
		06 - Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	2, 5	70 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.28 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.05.01.01 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Pitalebar	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur pitalebar	01 - Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	2	8.226 desa (kumulatif)	16.108.520,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KPBUI) (Memiliki proyek berstatus PSN)
05.05.01.02 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur penyiaran	01 - Jumlah <i>transmitter</i> digital yang terbangun	2	15 lokasi satuan transmisi	848.052,7	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
05.05.01.03 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	01 - Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/ <i>Government Network</i>)	2	40 %	1.553.648,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
05.05.02 KP: Pemanfaatan Infrastruktur TIK	01 - Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK	01 - Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	5	4,50-5,70 %	1.022.818,8	
		02 - Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	5	80 %		
05.05.02.01 PRO-P: Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	01 - Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara <i>multiplatform</i>	5	12 aplikasi	186.030,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KESEHATAN, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.29 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.05.02.02 PRO-P: Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	01 - Jumlah <i>startup</i> aktif yang terbentuk	5	90 <i>startup</i>	836.788,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KEUANGAN
05.05.03 KP: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	01 - Tersedianya fasilitas pendukung transformasi digital	01 - Jumlah peserta pelatihan digital <i>skill</i> untuk menuju ekonomi digital	1	50.000 peserta	2.670.747,4	
05.05.03.01 PRO-P: Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	01 - Jumlah konten negatif yang diblokir	1, 5	175.000 konten negatif	1.118.821,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN INTELJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERTAHANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.30 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
05.05.03.02 PRO-P: Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	01 - Terlaksananya pengembangan literasi dan keahlian TIK	01 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	1	5.000.000 orang	1.350.011,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
05.05.03.03 PRO-P: Pengembangan dan Fasilitasi Industri TIK	01 - Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi industri TIK	01 - Persentase pengembangan laboratorium BBPPT sebagai pusat TIK	1	50 %	201.914,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya dimunculkan pada salah satu ProP;
- 2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, dan KPBU, namun belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- 3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2022.
- 4) Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
 1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan Infrastruktur
 3. Penyederhanaan Regulasi
 4. Penyederhanaan Birokrasi
 5. Transformasi Ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.1 -

PRIORITAS NASIONAL 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
06 PN: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		69,22	6.817.443,7	
	02 - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	01 - Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB		0,91 %		
	03 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>	01 - Persentase penurunan emisi GRK		26,87 %		
		02 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK		21,54 %		
06.01 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)	5	55,3	2.206.719,4	
		02 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	5	59,5		
		03 - Indeks Kualitas Udara (IKU)	5	84,3		
		04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	5	63,5		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.01 KP: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	5	1.141 lokasi	1.345.628,5	
		02 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	5	3.000 perusahaan		
		03 - Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	5	70 juta ha		
		04 - Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari <i>baseline</i>	5	2,00 %		
		05 - Luas kawasan konservasi	5	27 juta ha		
		06 - Luas kawasan konservasi perairan	5	25,10 juta ha		
		07 - Akurasi informasi meteorologi	5	91 %		
		08 - Akurasi informasi klimatologi	5	82 %		
06.01.01.01 PRO-P: Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	01 - Tersedianya data kualitas air, air laut, dan udara	01 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis	5	14 unit	290.549,9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis	5	12 unit		
		03 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual	5	34 provinsi		
06.01.01.02 PRO-P: Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	01 - Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan	01 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	5	3.000 badan usaha	13.300,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah	5	3.000 badan usaha		
		03 - Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	5	30 pelabuhan		
		04 - Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	5	90 badan usaha		
		05 - Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	5	400 badan usaha		
06.01.01.03 PRO-P: Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	01 - Tersedianya informasi cuaca dan iklim	01 - Akurasi informasi Meteorologi Publik	5	88 %	488.778,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
		02 - Akurasi informasi Meteorologi Penerbangan	5	100 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.4 -

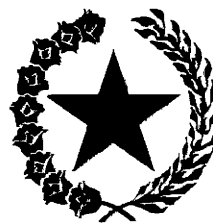
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Akurasi informasi Meteorologi Maritim	5	85 %		
		04 - Akurasi informasi iklim	5	82 %		
06.01.01.04 PRO-P: Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	01 - Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	01 - Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	5	900 desa	439.555,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
		02 - Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	5	150 KHG		
06.01.01.05 PRO-P: Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	01 - Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1	230 unit	3.015,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	15 produk		
06.01.01.06 PRO-P: Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	01 - Terlaksananya pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem	01 - Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	5	65 juta ha	98.435,3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional	5	13,89 juta ha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan	5	14 jenis		
		04 - Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	5	19 unit		
		05 - Jumlah kebun raya daerah yang dikembangkan	5	2 unit		
06.01.01.07 PRO-P: Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	01 - Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	01 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	5	70 juta ha	11.994,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah layanan balai kliring keanekaragaman hayati	5	1 layanan		
06.01.02 KP: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah sampah yang dikelola secara nasional	5	68,50 juta ton	345.959,6	
		02 - Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari <i>baseline</i>	5	40 %		
		03 - Jumlah limbah B3 yang dikelola	5	107,99 juta ton		
		04 - Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari <i>baseline</i> 4.546.946,30 kg BOD/hari	5	0,039 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.6 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.02.01 PRO-P: Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	01 - Tertanganinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	01 - Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	5	12 lokasi	47.875,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	5	36 unit		
06.01.02.02 PRO-P: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	01 - Terkelolanya timbulan sampah rumah tangga dan sampah plastik melalui pengurangan dan penanganan timbulan sampah	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	17,99 juta ton	203.792,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, PEMDA (DAK FISIK)
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,52 juta ton		
06.01.02.03 PRO-P: Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	01 - Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri	01 - Persentase penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 provinsi	5	20 %	3.950,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	2 unit		
06.01.02.04 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	01 - Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis	01 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun	5	1 unit	90.341,8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KPBU)
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5	5 unit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.03 KP: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	301.500 ha	351.500,0	
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	5	260.000 ton		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	26 lokasi		
		04 - Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	5	25 jenis		
06.01.03.01 PRO-P: Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	01 - Terlaksananya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 ha	6.727,3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	5	1.500 ha		
06.01.03.02 PRO-P: Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	01 - Terlaksananya pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3	01 - Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional	5	7.140 ha	40.313,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi yang terpulihkan	5	250.000 ton		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan non-institusi yang dipulihkan	5	10.000 ton		
06.01.03.03 PRO-P: Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	01 - Terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	26 lokasi	3.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.01.03.04 PRO-P: Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	01 - Terlaksananya pemulihan habitat spesies terancam punah	01 - Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	5	446.090 ha	58.518,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	5	57.096 ha		
06.01.03.05 PRO-P: Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	01 - Terlaksananya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	01 - Jumlah luas kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	5	11.494.300 ha	242.441,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
06.01.04 KP: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	5	65 %	163.631,2	
		02 - Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	5	132 kasus		
		03 - Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	5	2.150.000 ha		
		04 - Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	5	7 daerah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.04.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah	01 - Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	5	30 kajian	11.779,9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.01.04.02 PRO-P: Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	5	750 badan usaha	85.861,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	5	1 sistem		
		03 - Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	5	59 operasi		
		04 - Jumlah layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	5	80 layanan		
06.01.04.03 PRO-P: Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	5	110 perkara	65.990,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	5	22 perkara		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
06.02 PP: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01 - Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	5	0,10 %	3.416.552,6	
		02 - Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	5	0,81 %		
		03 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	5	4 menit		
06.02.01 KP: Penanggulangan Bencana	01 - Meningkatnya sistem dan respons peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana	01 - Rasio investasi PRB terhadap APBN	5	0,77	1.740.392,4	
		02 - Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	2	94 %		
		03 - Indeks Risiko Bencana Indonesia	5	135,38		
06.02.01.01 PRO-P: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	01 - Terlaksananya penguatan data, informasi, dan literasi bencana	01 - Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	4	5 layanan	141.906,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KESEHATAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	4	15 kegiatan		
		03 - Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	1	100 kegiatan		
06.02.01.02 PRO-P: Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	01 - Meningkatnya kualitas sistem, regulasi, dan tata kelola bencana yang saling bersinergi	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	4	14 kajian	2.200,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	2	3 sistem		
06.02.01.03 PRO-P: Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	01 - Meningkatnya kualitas sarana prasarana kebencanaan	01 - Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	3	250 kab/kota	26.000,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	2	75 %		
06.02.01.04 PRO-P: Integrasi Kerja Sama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana	01 - Terlaksananya integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	1	50 kajian	3.145,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana	5	55 dokumen		
06.02.01.05 PRO-P: Penguatan Penanganan Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penguatan penanganan darurat bencana	01 - Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa	1	0,20 jiwa	377.459,2	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KESEHATAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase waktu respons penanganan darurat kurang dari 24 jam	1	100 %		
06.02.01.06 PRO-P: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana	01 - Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	2	90 %	15.409,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	1	5 %		
06.02.01.07 PRO-P: Penguatan Sistem Mitigasi Multiancamam Bencana Terpadu	01 - Menguatnya sistem mitigasi multiancamam bencana terpadu	01 - Jumlah Sistem Mitigasi Multiancamam Bencana (MHEWS) terpadu	2	1 sistem	1.174.271,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOPISIKA, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	1	200 kelompok		
		03 - Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancamam bencana	1	514 kab/kota		
		04 - Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana	1	0,0048 nilai		
06.02.02 KP: Peningkatan Ketahanan Iklim	01 - Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	5	0,543 %	1.676.160,3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.13 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	5	0,045 %		
		03 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	5	0,156 %		
		04 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	5	0,062 %		
06.02.02.01 PRO-P: Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	5	6 kawasan	68.180,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80 persen	5	20 pelabuhan		
		03 - Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	2	23 km		
06.02.02.02 PRO-P: Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Tambahan debit air baku di kawasan rawan air	2	2,86 m ³ /detik	1.380.883,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	8 wilayah sungai		
		03 - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	5	35.000 ha		
06.02.02.03 PRO-P: Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	2	270 unit	109.723,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang meningkat pemahaman iklim melalui sekolah lapang iklim	5	2.400 orang		
06.02.02.04 PRO-P: Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan lingkungan sehat	1	514 daerah (prov/kab/kota)	117.373,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
06.03 PP: Pembangunan Rendah Karbon	01 - Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan	01 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi	5	10,58 %	1.194.171,7	
		02 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan	5	39,55 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah	5	35,75 %		
		04 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU	5	17,87 %		
		05 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan	5	6,80 %		
06.03.01 KP: Pembangunan Energi Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi	01 - Porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional	5	15,70 %	120.256,5	
		02 - Intensitas energi primer	5	136,60 SBM/miliar rupiah		
		03 - Penurunan intensitas energi final	5	0,90 SBM/miliar rupiah		
06.03.01.01 PRO-P: Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	01 - Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan Energi Baru Terbarukan	01 - Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT	2	1.933,3 megawatt	113.560,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik	5	9,60 juta kiloliter		
06.03.01.02 PRO-P: Efisiensi dan Konservasi Energi	01 - Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	5	100 %	6.695,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
06.03.02 KP: Pemulihan Lahan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	301.500 ha	874.598,1	
		02 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	435.000 ha		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VI.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	80 %		
06.03.02.01 PRO-P: Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	01 - Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 ha	-	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	5	1.500 ha		
06.03.02.02 PRO-P: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	01 - Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi	01 - Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	5	35.000 ha	3.275,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas penanaman pada hutan produksi	5	400.000 ha		
06.03.02.03 PRO-P: Pengurangan Laju Deforestasi	01 - Berkurangnya laju deforestasi	01 - Penurunan laju deforestasi	5	200.000 ha/tahun	166.056,9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	01 - Terlaksananya optimasi lahan pertanian	01 - Jumlah optimasi lahan pertanian	5	41.600 ha	705.266,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
06.03.03 KP: Pengelolaan Limbah	01 - Meningkatnya pengelolaan limbah	01 - Jumlah sampah yang dikelola secara nasional	5	68,50 juta ton	188.817,1	
06.03.03.01 PRO-P: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	01 - Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	17,99 juta ton	188.817,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,52 juta ton		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
06.03.04 KP: Pengembangan Industri Hijau	01 - Meningkatnya keberlanjutan industri	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	5	46 perusahaan	10.500,0	
06.03.04.01 PRO-P: Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	01 - Meningkatnya penerapan proses dan teknologi industri yang lebih berkelanjutan	01 - Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau	5	5 NSPK	10.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
06.03.05 KP: Rendah Karbon Pesisir dan Laut	01 - Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah luas rehabilitasi hutan <i>mangrove</i>	5	11.250 ha	-	
06.03.05.01 PRO-P: Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	01 - Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	5	26 lokasi	-	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya dimunculkan pada salah satu ProP;
- 2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, dan KPBU, namun belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- 3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2022.
- 4) Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
 1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan Infrastruktur
 3. Penyederhanaan Regulasi
 4. Penyederhanaan Birokrasi
 5. Transformasi Ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.1 -

PRIORITAS NASIONAL 7 : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07 PN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	01 - Indeks Demokrasi Indonesia		78,06	35.678.567,7	
		02 - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah		75 %		
	02 - Optimalnya kebijakan luar negeri	01 - Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional		96,30		
	03 - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	01 - Indeks Pembangunan Hukum		0,56		
	04 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	01 - Indeks Pelayanan Publik		4,29		
	05 - Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	01 - Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya		100 %		
07.01 PP: Konsolidasi Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	4	77,25	1.749.099,8	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.2 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - IDI Aspek Kebebasan	4	83,00		
		03 - IDI Aspek Kesenjangan	4	78,82		
		04 - Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	3	3 dokumen		
07.01.01 KP: Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi	01 - Kaderisasi oleh partai politik peserta pemilu	4	74,6 skor	1.018.385,0	
07.01.01.01 PRO-P: Penguatan Penyelenggara Pemilu	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggara pemilu	01 - Jumlah satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggara pemilu	4	549 satker	884.709,7	KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
07.01.01.02 PRO-P: Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	01 - Menguatnya peraturan perundangan bidang politik	01 - Jumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	3	2 rekomendasi kebijakan	1.100,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.01.03 PRO-P: Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	01 - Meningkatnya bantuan keuangan partai politik	01 - Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR	1	126.376.418 suara sah	126.376,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.01.04 PRO-P: Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	01 - Menguatnya demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik	01 - Jumlah pengurus partai politik yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	1	100 orang	4.498,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VII.3 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah rekomendasi kebijakan terkait politik dalam negeri	4	4 rekomendasi kebijakan		
07.01.01.05 PRO-P: Penguatan Demokrasi di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan demokrasi di daerah	01 - Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	1	15 provinsi	1.700,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.02 KP: Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kesetaraan dan kebebasan	01 - Terbebas dari ancaman dan/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan	4	93,85 skor	3.000,0	
		02 - Keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif	4	60,80 skor		
07.01.02.01 PRO-P: Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	01 - Terselenggaranya pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang tepat sasaran dan berkelanjutan	01 - Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	4	skor	2.350,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
07.01.02.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Meningkatnya kapasitas organisasi kemasyarakatan	01 - Jumlah pengurus ormas yang mengikuti fasilitasi peningkatan kapasitas	1	250 kelompok masyarakat	650,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.03 KP: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	01 - Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	1	71 %	727.714,8	
		02 - Persentase konten informasi publik yang berkualitas	1	85 %		
		03 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	200.000 orang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.4 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07.01.03.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	01 - Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	3	3 dokumen	27.836,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.02 PRO-P: Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T	01 - Tersedianya konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	01 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	1	65 %	141.567,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika	01 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	200.000 orang	506.595,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.04 PRO-P: Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	01 - Terlaksananya peningkatan literasi TIK masyarakat	01 - Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK	1	4.650 orang	2.554,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.05 PRO-P: Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya penelitian strategis bidang komunikasi dan informatika	01 - Jumlah penelitian strategis bidang komunikasi dan informatika	4	1 dokumen	1.500,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.06 PRO-P: Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	01 - Terlaksananya penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	01 - Indeks Kemerdekaan Pers	1	76,00	23.106,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.07 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga penyiaran	01 - Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	1	58 lembaga penyiaran	24.553,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.02 PP: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	01 - Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	5	13 forum	315.816,8	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.5 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	1	3,90		
		03 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	88,00		
07.02.01 KP: Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	01 - Menguatnya integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri	01 - Persentase penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri	1	35,20 %	218.112,0	
		02 - Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	2	49,01		
07.02.01.01 PRO-P: Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara	01 - Terlaksananya penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	01 - Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan peningkatan kerja sama kelautan yang diselesaikan	2	100 %	23.272,8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.02.01.02 PRO-P: Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral	01 - Terlaksananya penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	1	88 %	194.839,2	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
		02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	1	88 %		
		03 - Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	1	88 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.6 -

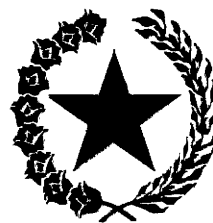
PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07.02.02 KP: Penguatan Kerja sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya penguatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	5	115 program/kegiatan	54.012,9	
07.02.02.01 PRO-P: Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	5	154,00 Rp miliar	51.312,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, SEKRETARIAT NEGARA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
07.02.02.02 PRO-P: Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (<i>Enabling Environment</i>) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terciptanya lingkungan yang mendukung (<i>enabling environment</i>) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerja sama pembangunan internasional	01 - Tingkat partisipasi aktor nonpemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional	5	2,65-2,74 %	2.700,0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
07.02.03 KP: Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	01 - Meningkatnya citra positif di dunia internasional	01 - Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	5	86 %	1.545,0	
07.02.03.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya	01 - Tersusunnya kebijakan diplomasi publik dan turunannya	01 - Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia	5	98 %	1.545,0	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
07.02.04 KP: Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	01 - Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global	01 - Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	5	97 %	42.147,0	
		02 - Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	5	97 %		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VII.7 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh <i>stakeholder</i> dalam negeri	5	85 %		
		04 - Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> dalam negeri	5	99 %		
07.02.04.01 PRO-P: Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang Diterima	01 - Meningkatnya inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	01 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral	5	270 rekomendasi/ prakarsa	40.091,9	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
		02 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN	5	260 rekomendasi/ prakarsa		
07.02.04.02 PRO-P: Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	01 - Terlaksananya optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB	01 - Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	5	10 peringkat	2.055,1	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
07.03 PP: Penegakan Hukum Nasional	01 - Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	01 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	4	4,06	384.758,1	
07.03.01 KP: Penataan Regulasi	01 - Terlaksananya penataan regulasi	01 - Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan MK dan MA	3	10,15 dan 9,05 %	5.186,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.8 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07.03.01.01 PRO-P: Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	01 - Terbentuknya lembaga pengelola regulasi	01 - Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	3	0,15 %	1.000,0	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
07.03.01.02 PRO-P: Pembaruan Substansi Hukum	01 - Terlaksananya pembaruan substansi hukum	01 - Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah	3	1 UU	4.186,0	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
07.03.02 KP: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	01 - Terlaksananya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata	01 - Persentase eksekusi putusan perdata	5	15 %	136.687,7	
		02 - Persentase pelaku residivis	5	7,56 %		
07.03.02.01 PRO-P: Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	01 - Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	01 - Jumlah eksekusi putusan perdata	5	1.577 perkara	8.735,9	MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
07.03.02.02 PRO-P: Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	01 - Terlaksananya penerapan pendekatan keadilan restoratif	01 - Persentase pengenaan alternatif pemidanaan	1	15 %	78.589,4	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KEMENTERIAN SOSIAL
07.03.02.03 PRO-P: Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	01 - Terwujudnya dukungan TI di bidang hukum dan peradilan	01 - Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	5	212 wilayah kerja	30.062,4	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, MAHKAMAH AGUNG, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.9 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim	01 - Terlaksananya peningkatan integritas dan pengawasan hakim	01 - Indeks Integritas Hakim	1	7,36	19.300,0	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
07.03.03 KP: Penguatan Sistem Anti Korupsi	01 - Terwujudnya penguatan sistem anti korupsi	01 - Survei penilaian integritas	5	72,00 nilai	64.782,5	
07.03.03.01 PRO-P: Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Terlaksananya penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Persentase capaian aksi Stranas PK	5	100 %	43.345,3	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
07.03.03.02 PRO-P: Optimalisasi Mekanisme Pemulihan dan Pengelolaan Aset	01 - Terlaksananya optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	01 - Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset	1	160 orang	21.437,3	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
07.03.04 KP: Peningkatan Akses terhadap Keadilan	01 - Terlaksananya peningkatan akses terhadap keadilan	01 - Indeks Akses terhadap Keadilan (persen)	5	71-80 %	178.101,9	
07.03.04.01 PRO-P: Penguatan Layanan Keadilan	01 - Terlaksananya penguatan layanan keadilan	01 - Aspek bantuan hukum pada Indeks Akses terhadap Keadilan (persen)	5	71-80 %	157.733,9	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
07.03.04.02 PRO-P: Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	01 - Terlaksananya pemberdayaan hukum bagi masyarakat	01 - Aspek kemampuan masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan	5	71-80 %	20.368,0	MAHKAMAH KONSTITUSI RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VII.10 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07.04 PP: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	01 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (K/L)	4	84,22	240.789,2	
		02 - Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (Provinsi)	4	73,65		
		03 - Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (Kab/Kota)	4	69,15		
07.04.01 KP: Penguatan Implementasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya penguatan implementasi manajemen ASN	01 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas (Kementerian)	4	100,00 %	40.000,0	
		02 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas (LPNK)	4	95,00 %		
		03 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas (Provinsi)	4	61,00 %		
		04 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas (Kabupaten/Kota)	4	20,00 %		
07.04.01.01 PRO-P: Manajemen Talenta Nasional ASN	01 - Terbangunnya manajemen talenta nasional ASN	01 - Jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN (K/L/Provinsi/Kab/Kota)	4	10 instansi pemerintah	16.200,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.11 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07.04.01.02 PRO-P: Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	01 - Terlaksananya peningkatan penerapan sistem merit ASN	01 - Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik ke Atas (IP)	4	162 instansi pemerintah	16.800,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
07.04.01.03 PRO-P: Perluasan Implementasi Sistem Integritas	01 - Menurunnya pelanggaran disiplin ASN	01 - Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	4	15 %	7.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
07.04.02 KP: Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya transformasi pelayanan publik	01 - Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (instansi)	4	150 per 587 instansi pemerintah	30.591,2	
07.04.02.01 PRO-P: Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services) yang Terintegrasi	01 - Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	01 - Tersedianya portal pelayanan publik pemerintah pusat dan daerah (portal pelayanan publik)	4	1 sistem informasi	2.500,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.02.02 PRO-P: Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik	01 - Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	01 - Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan	4	5.830 laporan	24.841,2	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.02.03 PRO-P: Penguatan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem inovasi	01 - Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang mereplikasi inovasi	4	500 Unit Pelayanan Publik	2.250,0	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.02.04 PRO-P: Penguatan Pelayanan Terpadu	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan terpadu	01 - Jumlah Mal Pelayanan Publik	4	9 Mal Pelayanan Publik	1.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.03 KP: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	01 - Tertatanya kelembagaan dan proses bisnis	01 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE baik ke atas (Kementerian/Lembaga)	4	80 %	54.252,1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.12 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE baik ke atas (Provinsi)	4	60 %		
		03 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE baik ke atas (Kab/Kota)	4	30 %		
07.04.03.01 PRO-P: Penataan Kelembagaan	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan	01 - Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya	4	21 instansi pemerintah	1.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.03.02 PRO-P: Penerapan SPBE Terintegrasi	01 - Meningkatnya nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE Nasional	01 - Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE Nasional	4	2,1	53.252,1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.04 KP: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Terwujudnya reformasi sistem akuntabilitas kinerja	01 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kementerian/Lembaga)	4	93 %	115.945,9	
		02 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Provinsi)	4	93 %		
		03 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kabupaten)	4	82 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.13 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kota)	4	93 %		
		05 - Persentase instansi pemerintah dengan skor B ke atas terhadap SAKIP (Kementerian/Lembaga)	4	98 %		
		06 - Persentase instansi pemerintah dengan skor B ke atas terhadap SAKIP (Provinsi)	4	90 %		
		07 - Persentase instansi pemerintah dengan skor B ke atas terhadap SAKIP (Kabupaten/Kota)	4	65 %		
07.04.04.01 PRO-P: Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi	01 - Meningkatnya kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional	4	9 rekomendasi kebijakan	5.100,0	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.04.02 PRO-P: Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja pembangunan	01 - Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan	4	247 rekomendasi	110.845,9	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
07.05 PP: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	01 - Terjaganya stabilitas pertahanan dan keamanan Nasional	01 - Indeks Kekuatan Militer	2	0,24	32.988.103,8	
		02 - Indeks Terorisme Global	5	4,34		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.14 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	3	>55 %		
		04 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3	3,20		
07.05.01 KP: Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01 - Menguatnya keamanan dalam negeri	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	4	38,00	955.948,6	
		02 - Indeks Risiko Terorisme (Target)	4	54,26		
		03 - Angka pelanggaran lintas batas negara	4	<250 pelanggaran		
		04 - Angka kejadian konflik	4	45 kejadian		
		05 - Angka korban pengungsi internal	4	≤15.000 orang		
07.05.01.01 PRO-P: Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	01 - Meningkatnya deradikalisasi dan penanganan terorisme	01 - <i>Clearance rate</i> terorisme	5	77 %	629.039,8	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT), BADAN INTELIJEN NEGARA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	5	125 orang		
		03 - Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	5	128 kegiatan		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VII.15 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	5	44 institusi		
07.05.01.02 PRO-P: Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan	01 - Terlaksananya pengamanan objek vital dan target rentan	01 - Jumlah objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan	5	2.179 objek vital dan target rentan	20.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.01.03 PRO-P: Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terlaksananya penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar	01 - Jumlah pos pamtas, posal, pos pol subsektor, dan PLBN yang dibangun	2	56 m ²	278.870,5	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTAHANAN
		02 - Panjang jalan inspeksi patroli perbatasan	2	200 km		
		03 - Jumlah penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem hankamor	1	180 orang		
		04 - Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan sarana prasarana pertahanan dan keamanannya	2	49 PPKT		
07.05.01.04 PRO-P: Penanganan Konflik secara Humanis	01 - Tertanganinya konflik secara humanis	01 - Tertanggulangnya potensi konflik sosial di tingkat kabupaten	5	23 kasus	26.876,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah anggota satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	1	900 orang		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VII.16 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07.05.01.05 PRO-P: Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	01 - Terwujudnya keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana	01 - Jumlah korban bencana yang diselamatkan	4	120.000 orang	1.161,4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.02 KP: Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	01 - Terwujudnya kemampuan pertahanan yang kuat dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	01 - Pemenuhan MEF	4	86 %	26.522.436,3	
		02 - Persentase kontribusi industri pertahanan	5	≥50 %		
07.05.02.01 PRO-P: Pengadaan Alutsista	01 - Terlaksananya pengadaan alutsista	01 - Jenis alutsista yang diadakan	4	23 jenis	12.020.092,1	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.02 PRO-P: Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	01 - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan alutsista	01 - Jenis alutsista yang diharwat	4	20 jenis	8.209.009,6	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.03 PRO-P: Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan	01 - Terlaksananya pembangunan sarana-prasarana pertahanan	01 - Jumlah sarpras pertahanan yang dibangun	2	5 jenis	794.393,6	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.04 PRO-P: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang meningkat	01 - Jumlah sarpras profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang dibangun	2	25 jenis	2.312.527,1	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.05 PRO-P: Pembangunan Pertahanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan pertahanan siber	01 - Jumlah sistem siber pertahanan yang dibangun	4	1 sistem	38.720,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.06 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	5	5 jenis	3.147.693,8	KEMENTERIAN PERTAHANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.17 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07.05.03 KP: Penguatan Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penguatan keamanan laut	01 - Angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut	4	246 jumlah	1.051.274,5	
07.05.03.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	01 - Terlaksananya operasi keamanan laut yang kuat	01 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	4	65 %	1.050.353,9	BADAN KEAMANAN LAUT, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.03.03 PRO-P: Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penyelesaian kasus keamanan laut yang meningkat	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana laut	4	80 %	920,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.04 KP: Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	01 - Angka prevalensi penyalahguna narkoba	1	1.86 %	4.286.234,1	
		02 - <i>Crime rate</i>	4	112 orang/ 100.000 penduduk		
		03 - Pelayanan publik Polri yang prima	4	64 %		
07.05.04.01 PRO-P: Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana narkotika	1	87 %	193.907,4	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah kawasan yang pulih dari tanaman terlarang	5	3 kawasan		
07.05.04.02 PRO-P: Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Meningkatnya pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja	1	52,00	79.540,0	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARHAGA
		02 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek fisik	1	7,0 %		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.18 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek psikologis	1	7,0 %		
		04 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek hubungan sosial	1	6,0 %		
		05 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek sumber daya lingkungan	1	5,0 %		
		06 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	4	3,13		
07.05.04.03 PRO-P: Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	01 - Tertanganinya kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana TPPO serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan	4	84 %	12.999,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.04.04 PRO-P: Peningkatan Layanan Kepolisian yang Presisi sebagai Kelanjutan Promoter	01 - Terlaksananya peningkatan layanan kepolisian yang Presisi sebagai kelanjutan promoter	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	4	8,3	41.533,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - <i>Clearance rate</i>	4	65 %		
		03 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana kejahatan perbankan dan TPPU	4	59 %		
07.05.04.05 PRO-P: Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	01 - Terlaksananya pengadaan almatsus dan alpalkam dukungan layanan kepolisian	01 - Jumlah almatsus dan alpalkam kepolisian	2	6 paket	3.308.288,1	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.19 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase almatsus dan alpalkam kontribusi industri pertahanan	5	30 %		
07.05.04.06 PRO-P: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Anggota Polri	01 - Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri	01 - Jumlah personel yang tersertifikasi diklat profesional	1	9.517 personel	649.965,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah unit pemenuhan rumah negara	2	603 unit		
		03 - Jumlah rumah sakit yang dibangun/meningkat akreditasinya	2	1 unit		
		04 - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	4	78 %		
07.05.05 KP: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	01 - Terwujudnya ketahanan dan keamanan siber yang kuat	01 - Skor <i>Global Cyber Security Index</i>	1, 2	0,826 nilai	172.210,4	
07.05.05.01 PRO-P: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan tim cepat tanggap keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar <i>Technical</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	2	0,171 nilai	14.257,2	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
07.05.05.02 PRO-P: Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar <i>Organizational</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	4	0,133 nilai	125.178,4	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, BADAN INTELIJEN NEGARA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
		02 - Skor Pilar <i>Technical</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	2	0,171 nilai		
		03 - Skor Pilar <i>Capacity Building</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	1	0,189 nilai		
07.05.05.03 PRO-P: Penyelesaian Kejahatan Siber	01 - Terlaksananya penyelesaian kejahatan bidang siber	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana siber	5	63 %	16.831,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.20 -

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
07 05.05.04 PRO-P: Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber	01 - Terwujudnya pencegahan kejahatan siber melalui peningkatan kerja sama internasional bidang siber	01 - Skor Pilar <i>Cooperation</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	1, 5	0,139 nilai	15.943,1	BADAN INTELIJEN NEGARA

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional. Untuk proyek yang mendukung lintas PP/KP/ProP dalam 1 PN, alokasi hanya dimunculkan pada salah satu ProP;
- 2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, dan KPBU, namun belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- 3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2022.
- 4) Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
 1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan Infrastruktur
 3. Penyederhanaan Regulasi
 4. Penyederhanaan Birokrasi
 5. Transformasi Ekonomi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yulia Silvanna Djaman

SK No 053036 C